



● TABLOID REFERENSI PEMILU 2024 ●

Info Indonesia

MINGGU III AGUSTUS 2023

Harga @Rp 20.000,-



Road to
Election
2024



GANJAR PILIH ERICK ATAU RIDWAN KAMIL

JELANG
PEMILU MAKIN
BANYAK
HOAKS

USULAN
TUNDA
PEMILU
MUNCUL LAGI

PERTARUNGAN
TOKOH MUDA
DI PILKADA
JAKARTA

BANYAK YANG NOLAK
JADI CAWAPRESNYA,
ANIES BASWEDAN
MAKIN BINGUNG

KADER
DAERAH CUMA
NUNGGU
PERINTAH



INFO REDAKSI

Minggu III • Agustus 2023

“Dukungan Partai Golkar ke Prabowo sudah mengantongi restu dari Presiden Jokowi”



Hashim Djojohadikusumo

Bingung Mencari Pendamping

Tujuh bulan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, partai politik dan calon presiden kini disibukkan dengan upaya mencari pasangan yang tepat, yakni sosok calon wakil presiden yang bisa mengantarkan kemenangan.

Tiga kandidat capres utama, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan belum ada yang berani mengumumkan siapa yang akan menjadi pendamping mereka di pesta demokrasi lima tahunan.

Begitu sulitkah mencari cawapres yang bisa membantu meraih kemenangan? Atau para capres dan elite partai politik masih saling melakukan kalkulasi terbaik demi meraih suara rakyat?

Hanya mereka dan Tuhan yang tahu jawabannya, publik hanya bisa menanti sampai hari terakhir pendaftaran pasangan capres dan cawapres, November mendatang.

Tabloid Info Indonesia edisi III Agustus 2023 fokus membahas siapa yang layak menjadi pendamping ketiga capres, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Ganjar Pranowo dihadapkan pada pilihan antara Menteri BUMN, Erick Thohir, atau Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil yang baru bergabung dengan Partai Golkar mampu menyita perhatian karena mengalahkan elektabilitas Airlangga Hartarto. Padahal, Airlangga yang diamankan Partai Golkar sebagai capres.

Sementara, Erick Thohir saat ini menempati posisi teratas bursa cawapres. Ditambah, Ketua Umum PSSI ini memiliki logistik yang mumpuni untuk berlaga di Pilpres 2024.

Namun, siapapun yang akan mendampingi Ganjar Pranowo tergantung dari restu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Joko Widodo.

Anies Baswedan juga sedang dibuat bingung mencari sosok yang pas dan mau diajak sebagai cawapres. Beberapa tokoh yang dibidik, bahkan berasal dari usulan ulama, seperti Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Mahfud MD, hingga Muhaimin Iskandar. Namun, mereka menolak menjadi pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara, Prabowo Subianto tengah fokus menggalang dukungan dari partai lain, terutama koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Partai yang dikabarkan segera merapat adalah PSI, Partai Golkar, dan PAN. Partai-partai tersebut diklaim sudah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi untuk mendukung Prabowo.

Elektabilitas Prabowo yang tinggi serta unggul atas Ganjar dan Anies diyakini menjadi salah satu magnet partai politik merapat ke Menteri Pertahanan itu.

Selain terkait Pilpres 2024, pada edisi kali ini juga membahas rencana MPR melakukan amandemen UUD 1945. Pimpinan MPR mengklaim amandemen tersebut tidak akan dilakukan sebelum Pemilu 2024 digelar. Itu ini sebelumnya sudah bergulir dengan adanya wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, hingga presiden tiga periode.

Lalu, ada pula gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan anggota dewan agar hanya dua periode seperti masa jabatan presiden. Dan bisa ditebak, pimpinan dan anggota DPR ramai-ramai menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak berdasar karena tidak diatur dalam undang-undang.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan sudah siap menghadapi berbagai perselisihan yang terjadi pada Pemilu 2024. Kesiapan ini disampaikan langsung Ketua MK, Anwar Usman. Dengan pengalaman yang mereka miliki, MK telah melakukan berbagai persiapan dan antisipasi.

Masih banyak informasi menarik lainnya yang kami sajikan pada edisi III Agustus 2023 ini. Di antaranya terkait Pilkada di beberapa daerah dan sikap para kader terkait kebijakan elit partai dan lainnya. Selamat membaca!!!

Info Indonesia

Kamis, 3 November 2022



JOKOWI BERNYALI EVALUASI MENTERI

•Kemungkinan Kecil Berujung Reshuffle

JAKARTA - Menteri atau pejabat selingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini disambut pro-kontra. Lebih-lebih, situasi krisis ekonomi tahun depan mengharuskan semua menteri kabinet untuk lebih fokus pada tugas utama di pemerintahan.



Jokowi: Nanti Saya Telpon Konfirmasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan akan menghubungi tiga pemimpin partai politik yang mengajukan surat dukungan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada 17 Agustus 2023.

Info Indonesia

Kamis, 4 Agustus 2022



MENTERI NGEJET NYAPRES MUNDUR DARI SEKARANG

JAKARTA - Tidak bisa ditugasi, makin hari kian kentara siapa saja menteri yang ngebet mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden. Presiden Jokowi sendiri sudah memantapkan diri untuk tidak fokus berkarya karena konsentrasinya pecah ke urusan pencalonan. Masalahnya, rasa malu dan etika sudah lama rabi dari nurani para pejabat.



Kebut Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Pemerintah di 2022 melakukan survei di 212 kabupaten/kota. "Diharapkan, ini..."



Indonesia Menuju Industri Digital

JAKARTA - Indonesia diuntungkan dengan adanya industri digital terbesar di Asia Tenggara dalam delapan tahun ke depan. Hal itu dibantu dengan potensi ekonomi digital yang diperkirakan mencapai Rp2.000 triliun.

Ini Bukan Kriminal Biasa, Ada P...

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerima kedatangan Samudri Hudaib, ayah mendiang Hidayatullah Yusuf Hudaib alias Brigadir J. Kapada Samudri, Mahfud menelaah untuk beres. Lantaran kasus yang sedang ditangani. Berasidat Piri bersama tim khusus berisikan Kapri ini bukan kriminal biasa.



Info Indonesia is a media mass printed under the PT. DUA SATU PRO license. Contact: 021 278 123 91

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO. Sertifikat Dewan Pers Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022. PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzal Khan. REDAKSI: Rusdiyono. WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Rahmad Romli. REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani. REDAKTUR: Rio Taufiq Adam, Melati Tagore, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina. REPORTER: Nefri, Indra Hadi, Sadam M, Hardi Aar, Beni Martho Daya, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir. EDITOR & GRAFIS : Al Amin, Achilles. TATA LETAK : Sujatmiko. MEDIA SOSIAL: Haidir Ali. KEUANGAN : Dra Hj Nurkhamida. SEKRETARIS REDAKSI: Nur Aisah. PENGEMBANGAN BISNIS: RM Solehin, Zul Jamba. ADMINISTRASI: Ega Tri Gustina. DISTRIBUSI: Abdul Muchtar. HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %. 1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-. BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur. ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750. TELP 021-791 96781 FAX 021-791 96786. PALEMBANG Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30126 TELP : 0711-7442344



“Saya melihatnya Megawati akan menolak karena keduanya ternyata tidak cocok mendampingi Ganjar. Bagaimanapun, koalisi PDIP yang bakal menentukan itu adalah Megawati”

Ujang Komarudin

ERICK THOHIR ATAU RIDWAN KAMIL TERGANTUNG MEGAWATI DAN JOKOWI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menjadi bakal calon presiden di Pilpres 2024 yang diputuskan langsung Megawati Soekarnoputri.

Empat bulan pasca diumumkan sebagai capres dari partai pe-tahana, geliat Pilpres 2024 semakin hari semakin memanas. Sejumlah partai perlahan mulai mencoba mengusung para jagoanya untuk mengadu nasib dan berharap dipilih mendampingi Ganjar untuk bertarung di arena pesta demokrasi 2024.

Beberapa pekan setelah PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo menjadi bakal capres, Presiden Joko Widodo ditenggarai juga telah melansir nama-nama tokoh nasional yang dinilai cocok untuk mendampingi orang nomor satu di Jawa Tengah itu untuk bersaing merebut tahta di Pilpres 2024.

Presiden Jokowi menyebut terdapat tujuh nama yang dinilai cocok mendampingi Ganjar mengisi singgasana kursi Istana. Nama yang digadang-gadang telah cocok mendampingi Ganjar itu yakni Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno; dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

Selain itu, Presiden Jokowi juga turut menyebut nama Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto; Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; serta Menteri Pertahanan, Pranowo Subianto.

Tujuh bulan jelang Pilpres 2024, sejumlah partai politik yang berada di dalam pemerintahan kini mulai ramai menggoda PDIP agar memilih jagoanya mendampingi Ganjar. Baru-baru ini, terdapat dua partai yang ditenggarai paling mencolok menggoda PDIP untuk berebut kursi pendamping Ganjar di Pilpres 2024, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dua partai itu ditenggarai memiliki jagoan masing-masing untuk mendampingi Ganjar. Partai Golkar diduga bakal mengusung Ridwan Kamil, sedangkan PAN akan mengusung Erick Thohir. Meski begitu, keputusan terkait siapakah yang akan menjadi pendamping Ganjar tergantung restu Megawati Soekarnoputri.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, di antara dua nama yang telah disebut-sebut bakal diusung Partai Golkar dan PAN untuk mendampingi Ganjar, sosok yang dinilai cukup kuat adalah Erick Thohir. Alasannya, Erick Thohir sejauh ini cukup memiliki kekuatan

massa pendukung, khususnya telah mendapat dukungan suara dari kelompok organisasi agama Islam terbesar yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Yang lebih cocok itu Erick Thohir. Karena Erick di dukung PBNU,” kata Ujang kepada Info Indonesia, Kamis, 10 Agustus 2023.

Ujang melihat sosok Erick Thohir jika nantinya terpilih mendampingi Ganjar Pranowo ditenggarai akan mampu mendongkrak suara pada Pilpres 2024. Hal itu lantaran Erick Thohir sejauh ini memiliki track record yang cukup mumpuni dalam peta politik nasional dan memiliki elektabilitas yang paling tinggi di antara cawapres lain.

“Kalau ET bisa saja mendongkrak, karena dia elektabilitas paling tinggi di antara bacawapres yang ada,” terang Ujang.

Kendati demikian, Ujang menilai antara Erick Thohir ataupun Ridwan Kamil kemungkinan tidak akan dilirik Megawati Soekarnoputri. Sebab, menurut Ujang, keduanya disinyalir tidak disukai Megawati.

“Saya si melihatnya ya dua-duanya jangan-jangan enggak dilirik atau dipilih oleh Mega. Karena dua-duanya saya melihat Mega itu tidak suka, baik kepada Erick Thohir maupun kepada Ridwan Kamil,” kata Ujang.

Di sisi lain, Ujang mengatakan, sosok Erick Thohir sejauh ini berpeluang lebih tinggi mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di kontestasi Pilpres 2024, meskipun saat ini telah mendapat dukungan langsung dari PAN.

“Ya sebenarnya kalau Erick Thohir itu punya peluangnya itu sama Prabowo. Tapi dalam perjalanannya didukung oleh PAN, lalu ada juga didukung oleh partai lain,” ucap Ujang.

Ujang juga menilai, Ridwan Kamil yang diusung Partai Golkar ditenggarai belum cukup berpengalaman untuk mendampingi Ganjar di pesta demokrasi 2024. Menurut Ujang, sejauh ini pria yang akrab disapa Kang Emil itu lebih massif membangun citra dari pada bekerja secara substantif.

“Kalo untuk Ridwan Kamil saya melihatnya itu ya beruntung saja kalau dicawapreskan. Karena saya melihat dia lebih banyak pencitraannya dari pada kerja-kerja substansinya. Lalu, saya melihat keduanya itu telah diusulkan oleh Golkar atau PAN untuk mendampingi Ganjar,” jelas Ujang.

“Jadi, saya melihatnya Megawati akan menolak karena keduanya ternyata tidak cocok mendampingi Ganjar dalam penilaian Megawati. Karena bagaimanapun koalisi PDIP yang bakal menentukan itu adalah Megawati,” sambungnya.

Ujang menambahkan, dalam peta politik jelang Pilpres 2024, PDIP bakal memilih sosok pendamping Ganjar Pranowo di luar dari kedua sosok tersebut.

“Jadi Megawati itu memiliki kewenangan untuk bisa menentukan siapa cawapresnya. Saya si melihatnya bisa jadi bukan kedua orang itu, baik si RK ataupun Erick Thohir yang nantinya bakal ditunjuk untuk mendampingi Ganjar di Pilpres 2024,” ungkapnya.

Senada dengan Ujang, pengamat politik Citra Institute, Yusak Farhan, mengungkapkan, Erick Thohir belum tentu dapat terpilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 meski memiliki elektabilitas tinggi.

Kondisi itu, menurut Yusak, karena selama ini PDIP belum mem-

berikan sinyal positif kepada Erick Thohir meskipun sosok Menteri BUMN itu sejauh ini berada digaris politik Presiden Jokowi.

“Meskipun elektabilitas Erick Thohir sebagai

cawapres tinggi, namun sejauh ini, PDIP belum memberi signal positif atas Erick. Makanya PAN belum bergabung. Garis politik Erick adalah Jokowi. Dan sejauh ini Jokowi masih dianggap main di dua kaki, yaitu Ganjar dan Prabowo,” kata Yusak.

Menurut Yusak, Ridwan Kamil dinilai bakal berpotensi mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 apabila suara seluruh kader Partai Golkar tetap dalam kondisi solid di bawah tongkat kepemimpinan Airlangga Hartarto.

“Bagaimanapun, Golkar sedang dihadapkan pada ancaman Munaslub yang tidak bisa dianggap remeh. Jika Golkar mengambil opsi mengajukan Ridwan Kamil sebagai cawapres, maka opsi tersebut bukan tanpa kendala,” kata Yusak.

Kendati demikian, apabila Partai Golkar nantinya resmi menyodorkan Ridwan Kamil untuk mendampingi Ganjar, maka akan berdampak timbulnya keributan di internal. Hal itu karena belum tentu seluruh kader partai beringin dapat menyetujui keputusan mengusung Ridwan Kamil mendampingi Ganjar.

Keributan itu bakal muncul di internal Golkar karena banyak kader senior yang tak ingin Ridwan Kamil yang baru menjadi anggota langsung diusung dan dipromosikan menjadi pendamping Ganjar.

“Opsi RK untuk mendampingi Ganjar menjadi cawapres berpotensi menimbulkan riak-riak internal karena Ridwan Kamil merupakan kader baru Golkar. Selain itu, mandat Munas Golkar juga mengamanatkan Airlangga sebagai capres. Inilah yang menjadi problem,” jelas Yusak.

Kendati demikian, sepanjang solid, maka Golkar berpeluang menyodorkan Ridwan Kamil menjadi cawapres Ganjar.

“Saya kira PDIP akan lebih mempertimbangkan Ridwan Kamil mengingat elektabilitas RK yang cukup tinggi sebagai cawapres. Kekuatan basis RK di Jabar bisa menambal kelemahan Ganjar di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar itu,” tandas Yusak. ●



“Jika saya lihat kesamaan historis antara Pak Prabowo dengan Golkar itu memang lebih memungkinkan para pemilih Golkar untuk lebih memilih Pak Prabowo dibandingkan dengan yang lain”

Kacung Marijan



DAPAT RESTU JOKOWI, GOLKAR MERAPAT KE PRABOWO

Calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kini Tengah menikmati tingginya angka elektabilitas dan banyaknya dukungan dari partai politik di barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.

Baru-baru ini, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengeklaim elite Partai Golkar telah menemui Prabowo pada pekan lalu. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Lodewijk F Paulus, dan Dito Ariotedjo.

Hashim sendiri hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Namun, Hashim tak masuk dalam ruangan pertemuan antara Prabowo dan elite Partai Golkar tersebut.

“Saya jabat tangan waktu keluar dan sinyal dan semua senyum-senyum. Pak Prabowo, Pak Muzani, senyum-senyum, Pak Airlangga, Pak Lodewijk, dan Pak Dito juga senyum. Ternyata mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo,” ujar Hashim dalam acara pembekalan dan konsolidasi relawan Prabowo yang digelar secara daring, Kamis, 10 Agustus 2023.

Hashim juga menegaskan, dukungan Partai Golkar ke Prabowo sudah mengantongi restu dari Presiden Jokowi. Setelah Partai Golkar, dia mengeklaim bahwa dukungan kepada Prabowo juga akan dinyatakan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, ia tak mengungkap lebih detail terkait hal tersebut.

“Itu saya bisa katakan. So, itu yang empat partai yang ada di parlemen.

Saat ini yang sudah cenderung, sangat cenderung dukung Prabowo adalah PAN,” ujar Hashim.

Hashim sendiri yakin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga berkomitmen dalam mendukung Prabowo. Meskipun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sudah terbentuk selama satu tahun. “Yang pasti mendukung Prabowo adalah PKB, walaupun ya masih ada yang mempersoalkan siapa cawaprenya,” ujar Hashim.

Hashim juga mengungkapkan bahwa politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko, telah beberapa kali bertemu dengannya. Pertemuan itu terjadi sebelum Budiman berkunjung ke kediaman Prabowo.

Saat Budiman mendatanginya, ia sebenarnya menaruh rasa curiga. Sebab pada Pilpres 2014 dan 2019, Budiman notabene-nya selalu berseberangan dengan Prabowo.

“Saya bisa katakan, saya saksi hidup, Pak Prabowo dijebak oleh orang-orang yang saya kira jahat waktu itu. Dan pak Prabowo sampai

sekarang dia menyesal. Nah ini saya takut jangan-jangan, ya kawan baik, orang baik namanya Budiman dan teman-temannya akan jebak kami juga lagi,” ungkapnya.

Sebelum dua kali bertemu dengannya, Budiman terlebih dahulu bertemu asisten Hashim. Lalu, asistennya memberi kabar bahwa kedatangan Budiman bukan dalam rangka menjebak Prabowo.

“Dua jam saya diskusi sama beliau dan setelah diskusi saya berkesimpulan, ini orang-orang ini betul, sungguh, ikhlas. Oke kalau gitu, (Budiman) saya akan bawa (bertemu) ke Pak Prabowo,” ujar Hashim.

Sejak awal, Hashim menilai Budiman adalah sosok yang memiliki prinsip dan tak bisa dibeli. Namun klaimnya, Budiman menilai Prabowo adalah pemimpin yang tepat untuk masa depan Indonesia.

“Dia berkesimpulan Prabowo adalah pemimpin yang tepat. Capres yang tepat, dibanding yang lain, itu kata dia. Dan dia sudah sampaikan (ke Prabowo) dan sebentar lagi saudara-saudara, Bapak-Bapak bisa menyampaikan Pak Prabowo dan Budiman satu panggung bersama, itu minggu depan nanti,” terangnya.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Kacung Marijan, menilai mayoritas pemilih dari Partai Golkar lebih cenderung mendukung Prabowo Subianto dibandingkan Ganjar Pranowo. Hal tersebut sebagaimana yang terekam dalam survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga survei LSI Denny JA periode 3-15 Juli 2023.

“LSI Denny JA menunjukkan bahwa pemilih partai, pemilih Golkar, itu lebih cenderung memilih Pak Prabowo dibanding Pak Ganjar dan Pak Anies,” kata Kacung.

Adapun dari data survei LSI Denny JA, para pemilih yang berasal dari partai beraliansi beringin itu memberikan dukungan kepada Prabowo sebesar 62,9 persen. Sementara itu, dukungan yang diberikan kepada Ganjar berada di angka sebesar 35,3 persen.

Menurut Kacung, banyaknya pemilih Golkar yang mulai memberikan isyarat dukungan kepada Prabowo itu karena adanya kesamaan serta historis yang sudah terjalin di antara Golkar dan Prabowo.

“Jika saya lihat kesamaan, historis, antara Pak Prabowo dengan Golkar itu, memang lebih memungkinkan, para pemilih Golkar untuk lebih memilih Pak Prabowo dibandingkan dengan yang lain,” ucap dia.

Kacung juga menyampaikan, elektabilitas kokoh Prabowo menjadi daya tarik partai politik pengusung menjelang Pilpres 2024. “Sekarang trennya naik, jadi itu juga yang membuat daya tarik bagi partai-partai yang lain untuk gabung ke Pak Prabowo,” tutur dia.

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran, Ari Ganjar Herdiansyah, menilai sosok Prabowo

menjadi satu-satunya harapan Partai Golkar untuk menghindari perpecahan. Prabowo di anggap mampu memperjelas arah partai di Pilpres 2024, sekaligus menghindari perpecahan di internal partai beringin.

Menurut Ari, kedekatan dengan Menteri Pertahanan ini mampu memperjelas arah dan tujuan Golkar. Selain itu, juga bisa menyelamatkan Golkar dari ancaman permasalahan internal yang bisa lebih merusak.

Ari melihat, Golkar yang saat ini sedang dilanda masalah dan badai di tubuh partai dituntut untuk terus maju mengikuti kontestasi politik Indonesia di 2024. Prabowo menjadi angin segar bagi kader Partai Golkar lantaran membuat tujuan partai semakin jelas.

Ari Ganjar mengatakan, karena adanya permasalahan di internal membuat Golkar lebih memilih Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024. Merapat ke kubu Prabowo juga membuat Golkar memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilpres 2024.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mendadak merapat untuk mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic), Ahmad Khoiril Umam, menilai, hal itu tidak lain karena adanya arahan dari Presiden Jokowi. Karena itu, PSI akhirnya berani bersikap menerima Prabowo.

“Sikap dan keputusan politik PSI yang semula mendukung Ganjar dan kini cenderung mendukung Prabowo, besar kemungkinan atas sepengetahuan dan restu politik Jokowi,” kata Khoiril.

Khoiril menilai, pergerakan yang dilakukan oleh PSI tidak terlepas dari banyaknya jaringan relawan Jokowi pada Pilpres 2019, yang kini berbalik mendukung pencalonan Prabowo.

Khoiril menyebut, langkah politik yang diambil PSI semakin menguatkan bahwa jaringan politik Jokowi kian solid mendukung Prabowo pada Pilpres 2024.

“Sikap PSI ini mempertegas bahwa sel-sel politik di lingkaran Jokowi semakin solid berkumpul ke kubu Prabowo,” ucap dosen Universitas Paramadina tersebut.

Menurut Khoiril, semakin solidnya dukungan yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar Presiden Jokowi terhadap Prabowo, kian mengisyaratkan sebagai bentuk perlawanan secara terbuka kepada mesin politik Ganjar Pranowo yang sudah diusung terlebih dahulu diusung PDIP.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, Presiden Jokowi memang terlihat nyaman Bersama Prabowo. Salah satu contohnya ketika beberapa waktu lalu Presiden Jokowi beserta istri disopiri Prabowo Subianto dan Erick Thohir. Kemudian, Jokowi ditanya apa kesannya disopiri Prabowo dan dengan penuh semangat mengatakan, nyaman dan enak.

Adi mengungkapkan momen langka tersebut menyiratkan banyak hal. “Ini makin menebalkan keyakinan publik bahwa Jokowi pastinya dikaitkan dengan dukungan dan endorsementnya ke Prabowo,” kata Adi, Jumat, 11 Agustus 2023. ●RDO





“Saya nggak pernah nyodorin diri jadi cawapres Mas Anies lho, saya cuma merespons lamaran yang datang”

Yenny Wahid

BANYAK YANG NOLAK JADI CAWAPRESNYA, ANIES BASWEDAN MAKIN BINGUNG

Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, hingga kini masih belum mengumumkan sosok yang akan mendampinginya berlaga di Pilpres 2024. Di sisi lain, Partai Demokrat sebagai partai pendukung terus mendesak mantan gubernur DKI Jakarta itu segera mendeklarasikan cawapres kepada publik.

Sejauh ini, beberapa nama telah disebut sebagai calon potensial sebagai pendamping Anies. Mereka mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono; Menko Polhukam, Mahfud MD; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; hingga putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid.

Namun, nama-nama tersebut dikabarkan menolak untuk menjadi pasangan Anies di Pilpres 2024. Hanya AHY yang terus disodorkan oleh Partai Demokrat sebagai cawapres Anies. Apalagi, AHY dan Partai Demokrat adalah penentu maju tidaknya Anies di Pilpres 2024.

Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi, menyebut Khofifah Indar Parawansa menolak secara halus tawaran untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Politikus asal Gresik ini mengatakan Khofifah tidak memberi kepastian terkait tawaran cawapres Anies Baswedan.

“Dengan berbagai jalur mencoba mendekati Khofifah. Intinya tidak ada kepastian, tidak ada progres yang positif dari dia (Khofifah),” ujarnya.

Sementara itu, Yenny Wahid me-

gaskan tidak pernah menyodorkan diri menjadi cawapres Anies Baswedan meski dianggap cocok mendampingi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

“Saya nggak pernah nyodorin diri jadi cawapres Mas Anies lho, saya cuma merespons lamaran yang datang,” kata Yenny Wahid dalam cuitannya, Kamis, 10 Agustus 2023.

Pernyataan Yenny tersebut untuk merespons cuitan penolakan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, di Twitter. Dalam cuitan itu, Yenny juga mengaku mendukung AHY jadi cawapres Anies. “Justru saya mendukung Mas AHY jadi cawapres Mas Anies,” ucapnya.

Di sisi lain, Anies Baswedan juga menerima rekomendasi lima nama bakal cawapres dari kiai NU.

“Ya, tadi siang saya menerima rekomendasi nama yang disampaikan oleh para kiai di Surabaya. Kemudian saya terima itu, saya sampaikan terima kasih bahwa sudah ikut memikirkan, sudah ikut melihat nama-nama yang bisa berjuang bersama,” ujar Anies di Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.

Lima nama yang diusulkan yaitu Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Muhaimin Iskandar, AHY, dan Mahfud MD. Meski demikian, Anies menyatakan bahwa hal terpenting dari rekomendasi para kiai itu bukanlah nama-nama tokoh, namun sumbuhan pemikiran dari mereka.

“Kenyataan bahwa para kiai dan ulama secara serius memikirkan ini, membekali kami dengan doa, membekali kami dengan arahan, bahkan membekali kami dengan pilihan,” katanya.

Anies juga meminta masyarakat untuk bersabar karena pada waktu yang tepat, bakal cawapres pendampingnya akan diketahui masyarakat. “Nanti pada saatnya diumumkan,” kata Anies.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai, kabar menolaknya sejumlah tokoh mendampingi Anies lantaran kurang seriusnya Koalisi Perubahan dalam membangun komunikasi dengan mereka.

“Koalisi Perubahan sekadar mencari sensasi semata,” kata Efriza saat dihubungi, Jumat, 11 Agustus 2023.

Menurut Efriza, mundurnya nama-nama yang digadag-gadag siap mendampingi Anies lantaran mereka juga cukup yakin koalisi lain tertarik meminang mereka sebagai cawapres di Pilpres 2024. Keyakinan itu muncul karena memiliki massa

yang cukup banyak dan elektabilitas yang cukup tinggi untuk mengongkrak suara.

“Terlihat dari statement Khofifah yang tidak pernah didekati serius oleh Koalisi Perubahan, maupun Susi yang menyatakan dia tak punya modal politik, dan pernyataan gambang Yenny Wahid yang malah mendukung AHY,” kata Efriza.

Kendati demikian, Efriza menilai, bagi koalisi dan Anies, mundurnya mereka dari bursa kandidat cawapres tak memunculkan dampak yang signifikan bagi perolehan suara di Pilpres 2024. Sebab, di dalam KPP sebetulnya sudah ada nama yang ditengarai siap mendampingi Anies.

Efriza mengungkapkan, sosok yang sudah siap mendampingi Anies adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, Efriza menyebut, kesan KPP ditengarai sengaja tidak mendekati tiga srikandi itu lantaran mereka tak memiliki partai sebagai kendaraan politiknya.

“Jadi, Koalisi Perubahan tidaklah kompak dalam mendekati

nama-nama tersebut. Terkesan mendekati mereka karena ketiga nama itu non-partai untuk menyenangkan Nasdem saja. Tapi bisa dilihat, Partai Demokrat selalu berusaha menghalangi nama-nama itu agar AHY benar-benar diproses dampingi Anies Baswedan,” kata Efriza.

Efriza menambahkan, dalam perjalanannya, baik Demokrat atau PKS sejauh ini ditengarai terkesan seolah-olah menyetujui usulan Partai Nasdem untuk mencari calon lain di luar partai. Namun di satu sisi, kedua partai itu sepakat ketika Anies dipasangkan dengan AHY.

“Bagi mereka (PD-PKS), hanya sekadar berusaha agar Nasdem tak dongkol semata, maka nama-nama tersebut didekati, sambil berusaha nyari panggung dan merobut hati masyarakat yang fanatik terhadap Susi, Khofifah, maupun Yenny Wahid. Sejatinya, mereka plong dan bersyukur ditolak oleh nama-nama tersebut,” terang Efriza.

Direktur Eksekutif lembaga Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai ketidaktertarikan sejumlah tokoh untuk jadi cawapres Anies lantaran rekam jejak pengalaman politik yang belum mumpuni.

Hari mencontohkan, saat memimpin Jakarta, Anies dinilai belum bisa memuaskan masyarakat dari setiap kebijakannya.

Di sisi lain, Hari melihat, dugaan skandal kasus korupsi Formula E yang menyeret nama Anies di Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) juga menjadi salah satu faktor mundurnya sejumlah nama tersebut.

“Selain itu, koalisi partai pengusungnya tidak akan bisa selaras karena satu partai berkoalisi dengan pemerintah, sedangkan dua partai di luar pemerintah. Ganjar diusung oleh partai pemenang dua kali berturut-turut tentunya memiliki keunggulan lebih,” pungkasnya. ●



“Kami fokus menyempurnakan berkas bagi bakal caleg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota agar semua memenuhi syarat”



Eddy Soeparno

PASTIKAN GERINDRA MENANG PRABOWO PRESIDEN

Bakal calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Gerindra, Li Claudia Chandra, berupaya membangun hubungan yang lebih dekat dengan kader dan dapat menyampaikan visi misi Partai Gerindra guna memastikan representasi yang lebih baik di Pileg dan Pilpres 2024.

Pada Pileg 2024, Li Claudia Chandra menjadi bakal caleg DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat 2. Dia meminta seluruh kader Partai Gerindra di Kabupaten Melawi bahwa Pemilu 2024 nanti adalah saat yang tepat untuk mewujudkan “Prabowo Presiden Gerindra Menang”.

“Konsolidasi hari ini adalah untuk memastikan struktur partai ada dan siap menghadapi pemilu 2024,” ujar Li Claudia Chandra saat menghadiri Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) Partai Gerindra Melawi, Kamis, 10 Agustus 2023.

Li Claudia menuturkan, dirinya maju sebagai bakal caleg DPR RI merupakan per-

intah dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra untuk Dapil Kalbar 2.

“Kita bisa kuat kalau strukturnya kuat, kita harus punya pasukan kalau mau menang, kita berharap kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten nantinya harus bertambah. Target harus menang, buat masyarakat Dapil Kalbar 2 khususnya Melawi, pilih saya Li Claudia Candra maju DPR RI Dapil Kalbar 2,” pinta Claudia.

Ketua DPC Gerindra Melawi, lif Usfayadi, mengatakan, Rakorcab tersebut sangat berarti karena momentum menjelang Pemilu 2024. Mereka

juga semakin semangat dengan adanya Li Claudia Chandra yang sangat memotivasi kader-kader di Melawi.

“Kami sangat

terbantu dengan kehadiran Ibu Li Claudia. Terbukti hari ini dari desa-desa yang harus menempuh jarak puluhan kilometer, mereka mau hadir karena sudah mendengar kiprah Bu Claudia di bidang sosial dan politik. Dan ini menjadi semangat lebih bagi kami,” ujar lif Usfayadi.

lif Usfayadi menargetkan 6 kursi di DPRD Kabupaten Melawi pada Pemilu 2024. “Untuk DPR RI ditargetkan 1 kursi dan DPRD Provinsi kami targetkan 2 kursi,” kata lif.

Sementara itu, untuk Pilpres, lif akan berupaya memenangkan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. “Kader Gerindra harus optimis dalam mencapai target di Pemilu 2024. Saya yakin kader partai Gerindra Melawi sudah teruji dan siap memenangkan Pemilu 2024,” tegas lif.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Kalimantan Barat, Antonius Situmorang, mengatakan, pelaksanaan Rakorcab DPC Partai Gerindra Kabupaten Melawi berjalan dengan lancar, tinggal DPC melakukan konsolidasi ditingkat PAC sampai ke tingkat ranting.

“Tinggal kita bekerja sebaik mungkin, mendapat perintah apapun dari partai siap laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Antonius.

Kegiatan Rakorcab yang berlangsung di Gedung Sukiman Center Kabupaten Melawi dihadiri 11 PAC dan 169 Ranting serta bakal caleg DPRD Melawi serta daerah pemilihan 7.



15 Persen Caleg Masih Tidak Memenuhi Syarat

Sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024 mengoptimalkan tim khusus untuk memastikan seluruh bakal calon anggota legislatif yang statusnya tidak memenuhi syarat bisa melengkapi dokumen persyaratan.

Atensi khusus diberikan ke bakal caleg mengingat masa pencermatan rancangan daftar caleg sementara untuk mengganti dokumen persyaratan sangat pendek.

Hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum menunjukkan, 14,93 persen atau 1.541 dari 10.323 bakal calon

anggota legislatif DPR RI di Pemilu 2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Sebanyak 8.655 bakal caleg anggota DPR dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan data pencalonan 127 bakal caleg DPR dihapus dari daftar bakal caleg oleh parpol.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023, dokumen bakal caleg yang berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dinyatakan TMS dapat diganti pada masa pencermatan rancangan daftar caleg sementara (DCS) pada 6-11 Agustus 2023. Tahapan selanjutnya yakni penyusunan dan penetapan DCS pada 12-

18 Agustus, lalu pengumuman DCS 19-23 Agustus.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan, pada umumnya bakal caleg yang statusnya TMS disebabkan ketersediaan waktu mempersiapkan dokumen persyaratan yang terbatas. Bakal caleg akhirnya tidak memiliki cukup waktu untuk memenuhi semua dokumen persyaratan.

“Misalnya dokumen ijazah, ada beberapa bakal caleg kekurangan waktu untuk legalisasi karena hilang, bahkan sekolahnya sudah tidak ada lagi,” kata Fadli di Jakarta, Senin, 7 Agustus 2023.

Selain melengkapi dokumen bakal caleg yang statusnya TMS, Gerindra juga memanfaatkan tahapan ini untuk mengganti bakal caleg yang meninggal. Dua bakal caleg di antaranya Bambang Kristiono dan Desmond J Mahesa yang meninggal setelah didaftarkan ke KPU.

“Pengganti kedua bakal caleg petahana itu telah kami siapkan,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq, menuturkan, bakal caleg DPR dari Perindo yang statusnya TMS kurang dari 10 orang. Sebagian besar penyebabnya karena hasil pindai dokumen-dokumen persyaratan yang diunggah ke Silon buram sehingga tidak jelas dibaca. Masalah minor itu akan diselesaikan pada masa pencermatan

rancangan DCS.

“Kami punya tim gugus tugas pencalegan di semua tingkatan untuk mengurus semua hal terkait caleg. Mereka kini fokus menyiapkan dokumen pengganti agar seluruh bakal caleg Perindo statusnya MS,” katanya.

Di sisi lain, Perindo juga memanfaatkan tahapan ini untuk mengganti sebagian bakal caleg. Bakal caleg baru di beberapa dapil didaftarkan untuk memperkuat strategi pemenangan. Sebab, penyusunan caleg dinilai lebih berbobot jika disempurnakan mendekati tahapan penetapan DCS.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengatakan, 580 bakal caleg PAN tingkat DPR statusnya MS. Namun, sebagian bakal caleg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota statusnya masih TMS.

“Kami fokus menyempurnakan berkas bagi bakal caleg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota agar semua memenuhi syarat,” katanya.

Menurut dia, PAN belum memfinalisasi nomor urut bakal caleg di masa pencermatan rancangan DCS. Penentuan nomor urut baru dilakukan saat pencermatan daftar caleg tetap (DCT) pada 24 September hingga 3 Oktober. PAN ingin melihat bakal caleg bekerja keras meyakinkan pemilih agar mendapat nomor urut favorit.





“Mewakili daerah pemilihan, pasti di atas itu kan banyak program-program pemerintah dan kementerian yang bisa dibawa ke Dapil”

Antoni Yuzar

HIJRAH KE SENAYAN DORONG PEMBANGUNAN

Sejumlah nama politisi di daerah menyatakan diri maju menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2024. Mereka ingin melebarkan karirnya ke level nasional setelah cukup lama bergelut di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Ketua Komisi I DPRD Sumatera Selatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Antoni Yuzar, menyatakan akan hijrah dan bertarung untuk menjadi caleg DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumsel I yang meliputi Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, dan Lubuklinggau.

Politisi yang sudah malang melintang di dunia politik di Bumi Sriwijaya ini telah banyak pengalaman. Sebelum menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar pernah menjadi bagian dari DPRD Kota Palembang.

Dengan maju ke Senayan, Ketua Ikatan Keluarga Banyuasin itu bertekad akan mendorong agar pembangunan di Sumsel, khususnya di Dapil I, lebih banyak membuka lapangan pekerjaan dan lapangan usaha.

Antoni Yuzar menjelaskan, Dapil Sumsel I memperebutkan delapan kursi. Menurutnya, untuk partai besar bisa mengirimkan maksimal delapan calegnya. Namun, untuk partai kecil bisa lebih sedikit jumlah calegnya karena kadernya belum terlalu banyak.

“Tapi rata-rata delapan orang perwakilan dari masing-masing partai,” kata Antoni Yuzar.

Menurut Antoni Yuzar, kewenangan yang dimiliki DPRD provinsi dan kabupaten/kota terbatas dengan peraturan daerah, berbeda dengan DPR RI yang bersifat nasional.

“Kalau di DPRD provinsi dan kabupaten/kota ini kan terbatas dengan peraturan daerah yang kami buat. Tetapi kalau di pusat yakni DPR RI regulasinya undang-undang, jadi artinya DPR RI ini menentukan kebijakan secara nasional untuk menentukan arah kebijakan Pembangunan. Kemudian, regulasi yang dibuat, yang direvisi, dan diubah itu kan semuanya atas persetujuan

dari DPR RI, baik itu yang diusulkan oleh pemerintah maupun yang diinisiasi oleh DPR,” paparnya.

Dia menjelaskan, DPR punya peran besar untuk kesejahteraan rakyat dengan regulasi yang bagus, sehingga bisa berdampak positif untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya di Sumsel.

“Kemudian yang kedua selaku mewakili daerah pemilihan, pasti di atas itu kan banyak program-program pemerintah dan kementerian yang bisa dibawa ke Dapil,” ujarnya.

Antoni Yuzar mencontohkan, pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin yang saat ini masih belum jelas akan kembali didorong agar dilanjutkan oleh pemerintah. Dengan adanya pelabuhan internasional itu, maka akan bisa membuka banyak lapangan kerja dan usaha.

“Kemudian tempat wisata itu kan ada di Banyuasin. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan masuk ke Sumsel,” tuturnya.

Dia mengatakan, tidak ada tujuan lain dirinya mantap maju sebagai caleg DPR RI dari Dapil Sumsel I. Semuanya dilakukan sebagai perpanjangan tangan rakyat dari Dapil Sumsel I. Sehingga, hal-hal positif untuk pembangunan di Bumi Sriwijaya akan dilakukan.

“Saya sangat yakin dengan sungguh-

sungguh dan maksimal, karena ini bukan ajang coba-coba, karena ini sungguh-sungguh, kalau saya meninggalkan Dapil Sumsel, karena didasari oleh keinginan yang kuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumsel, khususnya Dapil I,” ungkapnya.

Selain Antoni Yuzar, ada beberapa orang wakil rakyat yang mendeklarasikan diri sebagai bakal caleg DPR RI dari Sumsel. Mereka yakni Ketua DPRD Sumsel, Anita Noerihati, yang maju melalui Partai Golkar di Dapil Sumsel I.

Di Dapil Sumsel 2, ada Giri Ramandha N Kiemas yang maju sebagai bakala caleg dari PDIP. Giri Ramandha merupakan Wakil Ketua DPRD Sumsel yang pernah mengikuti Pilgub Sumsel 2018, namun harus menelan kekalahan.

Selain dari Sumsel, ada banyak wakil rakyat di berbagai daerah di Indonesia yang tak puas hanya duduk di bangku legislatif level daerah. Mereka ingin naik kelas menuju ke Senayan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Ada juga petahana

yang tak ingin kehilangan kursinya dari pesaing-pesaing lain.

Dari Provinsi Jambi, ada beberapa nama yang mendaftarkan diri menjadi bakal caleg DPR RI. Sebut saja mantan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, yang menjadi bakal caleg dari PKB. Dia akan maju lagi menjadi anggota DPR RI untuk kedua kalinya.

Sementara, kader PKB lainnya, Saniatul Latifa juga akan kembali maju ketiga kalinya di Pileg 2024 setelah dua periode dia menjadi anggota DPR RI. Anggota DPRD Bengkulu Wan Sui juga akan maju dan bersaing sebagai caleg DPR RI Dapil Bengkulu di Pileg 2024.

Di Sulawesi Selatan, anak Bupati Enrekang Muslimin Bando, Mitra Fachruddin, yang kembali nyaleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Lalu di Kalimantan Selatan, anggota DPRD Kabupaten Banjar 2019-2024, Heru Jaya, bersiap maju sebagai bakal caleg DPR RI dari PKB untuk Dapil Kalsel I. Sebelumnya, Heru Jaya pernah menjalani Pergantian Antar Waktu (PAW) dan menduduki kursi legislator Senayan di Fraksi PKB saat menggantikan Zairullah Azhar yang menang Pilkada 2019 sebagai Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2020-2024.

Ada juga bakal caleg DPR RI yang mencari peruntungan lewat keluarganya yang lebih dulu terjun di dunia politik. Dia adalah Atalia Praratya Kamil, istri dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ibu tiga tiga anak ini mendaftarkan diri menjadi bakal caleg DPR RI dari Dapil Jabar melalui Partai Golkar. Meskipun suaminya sudah lama terjun di dunia politik, 2024 menjadi awal mula Atalia menjejalkan kaki di perpolitikan Tanah Air. ●



“PAN menyarankan jika capresnya ingin menambah nilai elektoralnya agar ada peluang besar untuk terpilih, maka sebaiknya berpasangan dengan Mas Erick Thohir”



Viva Yoga Mauladi

PAN NGOTOT CAWAPRESKAN ERICK THOHIR

Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyodorkan nama Menteri BUMN, Erick Thohir, sebagai calon wakil presiden kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Secara konsisten, PAN menyatakan akan mendorong Erick Thohir sebagai orang nomor dua di RI.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan, PAN akan terus memberikan dukungan penuh kepada Erick Thohir agar bisa maju di Pilpres 2024.

Dia menegaskan, PAN hanya akan berkoalisi dengan partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini, PAN terus melakukan penjajakan dengan partai koalisi pemerintah.

“PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah. Masih dalam proses maturasi atau pematangan proses koalisi,” ungkap Viva Yoga, Kamis, 9 Agustus 2023.

Terkait dengan penentuan koalisi, kata Viva, nantinya akan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

“Nanti akan diumumkan oleh Ketum PAN Bang Zulkifli Hasan dalam waktu ke depan,” jelasnya.

Dia mengatakan penentuan koalisi ini akan ditentukan dalam waktu dekat. PAN juga tidak ingin terlalu lama dalam menentukan partai koalisi. Sebab, sebentar lagi akan masuk tahapan pendaftaran pencalonan presiden dan wakil presiden.

“Intinya, ikan sepat, ikan gabus, dan ikan lele. Makin cepat, makin bagus, dan tidak bertele-tele,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pembahasan di internal PAN, penentuan koalisi sudah mengerucut. Namun, Viva belum ingin membeberkannya. Katanya, semua masih dalam proses dan terus dikomunikasikan.

“Iya sudah mulai mengerucut. Nanti akan diumumkan resmi oleh Bang Zulkifli Hasan,” terangnya.

Dia menjelaskan, setiap pertemuan PAN dengan partai politik tidak pernah menawarkan Erick Thohir sebagai cawapres. Namun, PAN selalu memberikan

pandangan bahwa Erick Thohir dapat memberikan efek elektoral cukup sebesar kepada sang capres. Sehingga, keberadaan Erick Thohir sebagai cawapres akan memberikan peluang bagi pasangan tersebut merebut suara besar dan bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2024.

“PAN tidak menawarkan Mas

Erick sebagai cawapres. Tetapi, PAN menyarankan jika capresnya ingin menambah nilai elektoralnya agar ada peluang besar untuk terpilih, maka sebaiknya berpasangan dengan Mas Erick Thohir,” jelasnya.

Selain itu, kata Viva, elektabilitas Erick Thohir di berbagai lembaga survei cenderung meningkat. Bahkan, ada yang menempatkan Erick Thohir di posisi teratas sebagai cawapres.

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, juga mengakui tengah melakukan negosiasi dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo supaya mau meminang Erick Thohir sebagai cawapres.

“Sekarang negosiasinya sedang jalan, negosiasi yang kami lakukan itu ya tadi, oke kami gabung kalau ET sebagai cawapresnya,” ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2023.

Hanya saja melihat hasil survei belakangan, PAN mengakui kecenderungan akan mendukung Prabowo. Dalam survei LSI Denny JA, Prabowo unggul 10 persen dari Ganjar secara head to head.

Menurut Yandri, Erick Thohir akan menjadi faktor penentu yang akan memenangkan kontestasi. “Ya bisa jadi walaupun ada selisih begitu, Pak Erick tetap faktor kemenangan, faktor penentu,” ujarnya.

Yandri menyebut Erick Thohir memiliki elektabilitas yang mumpuni berdasarkan hasil survei. Maka itu, ia yakin Erick Thohir bakal dilirik sebagai cawapres.

“Karena Pak Erick Thohir bisa memenangkan kontestasi dengan sekarang elektabilitasnya tertinggi untuk cawapres. Dari semua lembaga survei yang kredibel, itu tren Pak ET dari tahun lalu sekitar 5 persen, sekarang di angka 23 persen. Itu artinya tren positif yang sangat baik. Artinya publik merespons bahwa sosok ET itu layak untuk jadi pemimpin bangsa untuk posisi cawapres,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, meniali, jika PAN ingin memenangkan Pilpres, mengusung Erick Thohir merupakan pilihan yang realistis.

“Jika pertimbangannya hanya mengejar menang di Pilpres dan tidak di Pilleg,

maka mengusung Erick Thohir menjadi pilihan yang baik,” katanya.

Dia menerangkan, bila PAN mengusung Erick Thohir kemungkinan besar yang akan menggaetnya adalah Prabowo Subianto. Sebab, PAN akan sulit menawarkan Erick Thohir kepada PDIP dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Hanya saja pilihan ini terbatas, yakni hanya dengan Prabowo Subianto peluang menang itu membesar,” imbuhnya.

Dia menerangkan, partai berlambang matahari itu sebenarnya masih memiliki keyakinan terhadap Zulkifli Hasan untuk bisa maju di Pilpres 2024. Peluang itu besar jika Zulhas menjadi pendamping Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Dia menilai, peluang mengusung Zulkifli Hasan dan Erick Thohir di Pilpres tidaklah jauh berbeda. Namun, dia menyarankan agar PAN mengusung Zulkifli Hasan untuk menjaga suara partai.

“Peluang kalah antara usung Erick Thohir dengan usung diri sendiri setara, sehingga jauh lebih baik usung sendiri dengan orientasi menjaga suara partai tetap kuat bertahan,” terangnya.

Dedi menambahkan, dengan mengusung Erick Thohir, PAN berharap akan mendapatkan costtail effect atau efek ekor jas. Selain itu, PAN berharap bisa mendapatkan dukungan logistik dari Erick Thohir.

Menurutnya, jika PAN mengusung Erick Thohir akan lebih menguntungkan dan langkah Zulkifli Hasan sudah sangat tepat.

“Di luar itu, dengan usung Erick Thohir bisa saja PAN berharap mendapat dukungan tidak saja imbas elektabilitas Erick, melainkan juga dukungan logistik Erick pada partai. Dengan kondisi itu, pilihan Zulhas usung Erick cukup tepat,” katanya.

Dia menilai, PAN akan loyal dan totalitas kepada Erick Thohir jika Ketua Umum PSSI itu maju di Pilpres 2024. Sebab, Erick Thohir dan Zulkifli Hasan memiliki hubungan cukup dekat dan harmonis hingga kini.

“Jika membaca relasi antara PAN dan Erick, besar kemungkinan PAN loyal dan solid pada Erick, tentu bergantung perintah Zulkifli Hasan,” ujarnya. ●RDO





“Sangat disayangkan jika potensi besar Ridwan Kamil dikesampingkan demi obsesi Airlangga yang hanya karena ketua umum”

Efriza

MEGAWATI MAUNYA RIDWAN KAMIL

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, terus didorong oleh para kadernya untuk menjadi capres maupun cawapres. Namun, tidak satupun koalisi yang ada saat ini melirik keberadaan Airlangga Hartarto.

Karena itu, Partai Beringin pun kini nampak tak lagi ngotot untuk mendorong Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng, mengungkapkan, saat ini pihaknya mulai melirik untuk mengajukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menjadi bakal RI-2.

“Ridwan Kamil itu disurvei calon presiden nomor empat loh, di survei cawapres kadang-kadang nomor satu, kadang-kadang nomor dua. Itu (Ridwan Kamil) kan kader Golkar, dia salah satu wakil ketua umum,” ujar Melchias, Jumat, 28 Juli 2023.

Menurut dia, saat ini Golkar harus realistis meskipun banyak kader yang terus menjagokan Airlangga untuk menjadi bakal capres maupun cawapres. “Bahwa kader-kader ada yang menginginkan dia (Airlangga) ya wajarlah. Tetapi, kan kita harus melihat kondisi lapangan,” ujar dia.

Meski begitu, Melchias mengaku belum ada pembahasan soal dorongan Ridwan Kamil menjadi bacawapres untuk capres PDIP Ganjar Pranowo dalam pertemuan Airlangga dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, 27 Juli 2023. Pembahasan itu, menurut dia, bakal menjadi tugas tim teknis yang dibentuk oleh PDIP dan Golkar. Dia berharap agar kerja sama politik kedua partai politik itu bisa segera terwujud.

“Ikan sepat, ikan bagus, lebih cepat, lebih bagus,” ujar dia.

Pengamat politik dari Citra Insitute, Efriza, menilai, Airlangga Hartarto tidak memiliki daya tarik. Sehingga, tidak dilirik partai politik. Apalagi, elektabilitasnya terdegradasi.

“Airlangga elektabilitasnya minimalis. Calon kuat terdegradasi capres atau cawapres. Ia secara personal tidak menjual di masyarakat sebab tidak populer,” kata Efriza, Rabu, 9 Agustus 2023.

Dia menilai, safari politik yang dilakukan Airlangga selama ini tidak membuahkan hasil bagi dirinya maupun Partai Golkar. Bahkan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berpotensi bubar. PPP sudah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Kemungkinan besar, PPP akan berlabuh ke PDIP.

“Komunikasi politik Airlangga juga terlalu kaku,” jelasnya.

Berbeda dengan Ridwan Kamil yang juga kader partai beringin. Gubernur Jawa Barat itu memiliki karisma di masyarakat. Elektabilitasnya pun cukup bersaing dengan figur lainnya seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, bahkan Airlangga.

“Ridwan Kamil meski anggota baru Golkar nama dirinya secara popularitas dan elektabilitas tinggi. Ia dianggap gubernur Jawa Barat yang berhasil memimpin Jawa Barat,” terangnya.

Di sisi lain, Ridwan Kamil saat ini juga mengemban jabatan yang sangat strategis di Golkar. Kata Efriza, sebagai Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Golkar percaya bahwa Ridwan Kamil bisa menggaet suara pemilih.

“Ini menunjukkan Golkar menilai rekam jejak dan popularitas dirinya di masyarakat amat tinggi,” katanya.

Dia menilai, seharusnya Partai Golkar lebih realistis melihat peluang di antara Airlangga Hartarto dengan Ridwan Kamil. Efriza menyebutkan, pe-

luang Ridwan Kamil lebih besar ketimbang mengusung Airlangga di Pilpres.

“Semestinya Ridwan Kamil saja yang diajukan menjadi cawapres, ia juga dapat berkompetitif dalam menaikkan elektabilitas capres,” terangnya.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo itu menilai, jika Partai Golkar mengusung Ridwan Kamil, diyakini akan kebanjiran tawaran dari koalisi yang saat ini sudah terbentuk. Daya tarik Ridwan Kamil memang cukup kuat.

Dia menilai, Golkar harus lebih terbuka untuk mengajukan calon lain selain Airlangga Hartarto. Sebab, Pemilu 2024 menjadi pertarungan bagi Golkar. Dia menyarankan agar Airlangga Hartarto untuk legowo dan mundur dari pencapresannya.

“Sangat disayangkan jika potensi besar Ridwan Kamil dikesampingkan demi obsesi Airlangga yang hanya karena ketua umum. Partai Golkar harus melihat fakta, Ridwan Kamil adalah fenomenan dan trend kepal daerah sukses yang bisa diajukan sebagai cawapres,” tuturnya.

Dia mengatakan, potensi Partai Golkar untuk turun suaranya di Pemilu 2024 sangat besar jika masih ngotot mengusung Airlangga Hartarto.

“Golkar perlu ingat, potensi Golkar penurunan suara dan kursi cukup besar. Saat ini, Golkar partai peringkat ketiga, tetapi tidak diperhitungkan oleh partai-partai lain untuk diajak ke koalisi karena faktor Airlangganya. Ini miris,” tegasnya.

Walaupun Munas

Golkar memerintahkan Airlangga untuk maju sebagai capres, elektabilitas membuatnya harus rela cuma ditawarkan sebagai cawapres. Bahkan, perkembangan politik membuat Golkar harus menawarkan nama lain.

Opsi itu terbuka karena partai sebesar Golkar memang perlu mengusung nama dalam kontestasi pilpres. Apalagi, jika melihat posisi elektabilitas Airlangga, cukup realistis membuka opsi lain.

Namun, peneliti politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdusalam, mengatakan, merevisi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang mendorong Airlangga sebagai capres akan berdampak pada internal partai beringin tersebut.

Surokim mengatakan, tidak sepatutnya hasil dari Munas itu direvisi. Sebab, marwah Partai Golkar akan menjadi taruhannya.

Menurutnya, Partai Golkar harus tetap ngotot mendukung Airlangga sebagai capres. Sebagai partai pemilik suara terbesar nasional kedua, Golkar harus berjuang sekuat tenaga agar Airlangga maju di Pilpres 2024.

Dia mengatakan, jika nantinya Partai Golkar bergabung dengan koalisi harus tetap mendorong Airlangga. Namun, dalam keputusan koalisi muncul kandidat lain yang juga tergabung di Golkar, maka keputusan itu harus dibahas di internal partai beringin tersebut.

“Partai Golkar tetap maju saja mengajukan Pak Airlangga ke koalisi yang dipilih bergabung jika nanti ada perkembangan, dinamika di dalam koalisi, muncul nama lain kader Golkar yang menguat baru dikembalikan lagi Partai Golkar,” ujarnya.

Dia menilai, Partai Golkar harus mengetahui terlebih dahulu dinamika koalisi yang bakal terjadi sebelum memutuskan merevisi pencapresan Airlangga.

“Saya kira ini jalan elegan daripada belum tahu dinamika koalisi sudah dilakukan revisi, saya pikir itu akan mengurangi kehormatan partai,” ujarnya.

Jika pencapresan Airlangga direvisi sebelum mengetahui dinamika politik di masa mendatang, Partai Golkar akan dianggap sebagai partai yang tidak ingin memperjuangkan pucuk pimpinannya. “Kesannya kok ketum hanya dipakai hiasan saja tidak fight diperjuangkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, kata Surokim, jika ada calon kandidat capres yang muncul dari Partai Golkar selain Airlangga, termasuk Ridwan Kamil, maka Golkar harus menindaklanjuti dengan mekanisme partai. ●





Herman Deru

PESAING PETAHANA MULAI TEBAR PESONA

Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan pada 2024 akan digelar satu tahun mendatang. Namun, bursa calon gubernur yang akan menjadi pesaing petahana, Herman Deru, kini mulai bermunculan. Beberapa nama bahkan sudah memaparkan program kerja jika terpilih sebagai orang nomor satu di Bumi Sriwijaya.

Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan saat ini, telah menyatakan niatnya untuk maju dalam Pilgub Sumsel 2024. Saat ini, masa jabatan Herman Deru dan Wakilnya, Mawardi Yahya, akan berakhir pada 1 Oktober 2023.

"Bismillahirrahmanirrahim, mohon doa dan dukungannya maju lagi (Pilgub)," tegas Herman Deru belum lama ini.

Herman Deru juga mengonfirmasi bahwa Mawardi Yahya akan tetap menjadi calon wakilnya di Pilgub Sumsel 2024. Padahal, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, telah memerintahkan agar Herman Deru maju sebagai calon anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Sumsel II.

Niatan Herman Deru untuk maju Kembali di periode kedua dipastikan tidak akan mudah. Sebab, Ketua DPD NasDem Sumsel ini bakal mendapatkan persaingan yang cukup berat dari kandidat lainnya.

Beberapa nama yang dikabarkan akan maju di Pilgub Sumsel 2024 sudah cukup dikenal masyarakat. Mereka di antaranya mantan Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra; mantan Wakil Gubernur Sumsel 2013-2018, Ishak Mekki; Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Heri Amalindo; hingga Wali Kota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe.

Mantan Wali Kota Palembang yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI, Eddy Santana Putra, menyatakan akan maju di Pilgub Sumsel 2024. Ada beberapa alasan mengapa Eddy Santana Putra berniat maju di Pilgub Sumsel 2024, di antaranya ingin membuat Sumsel lebih maju dan berkonsep.

Saat menjadi anggota DPR, Eddy Santana Putra juga banyak menerima masukan dan dukungan. Salah satunya soal pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang hingga kini terkesan mangkrak.

"Kita ingin Pelabuhan Tanjung Carat direalisasikan dengan segera, karena ini menjadi penunjang ekonomi untuk Sumsel. Semua hasil

pertanian dan lainnya bisa diserap dengan adanya pelabuhan," terang Eddy.

Kemudian, sektor pariwisata juga menjadi perhatian penting Eddy karena di Sumsel masyarakatnya kurang hiburan.

Kandidat lainnya, Wali Kota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, dianggap sebagai salah satu kandidat yang cocok untuk ikut dalam pertarungan menjadi orang nomor satu di Sumsel tahun depan.

"Saat ini fokus adalah untuk menjadi anggota DPR RI terlebih dahulu," kata Nanan sapaan SN Prana Putra Sohe.

Nanan merasa bersyukur bahwa namanya telah diajukan dalam proses penjurian. Baginya, segala kemungkinan bisa terjadi di masa depan. "Namun, tentu kita tidak dapat memprediksi masa depan. Oleh karena itu, fokus saya adalah menjadi anggota DPR RI," ucapnya.

Nama calon gubernur Sumsel lainnya yang tidak asing adalah mantan Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki, yang telah menyampaikan tekadnya untuk berkompetisi dalam Pilgub Sumsel 2024.

"Saya siap untuk maju (Sumsel 1) jika partai menginginkannya. Sebagai kader, kesiapan adalah hal yang penting," tegas Ishak Mekki.

Terkait isu bahwa dirinya masih menjadi salah satu calon potensial dalam Pilgub Sumsel 2024, Ishak Mekki menyatakan rasa bangganya terhadap masyarakat yang telah menjaga suasana politik yang kondusif di Sumsel.

"S a y a m e r a s a b a n g g a d e n g a n

masyarakat Sumsel. Meskipun intensitas politik semakin meningkat dan situasi semakin panas, namun kondusifitas di Sumsel tetap terjaga," ungkapnya.

Ishak Mekki telah menyatakan optimisme dalam menghadapi Pilgub Sumsel 2024, mengingat semua calon potensial akan bersaing sejak awal.

Sosok lainnya yang sudah mulai memperkenalkan diri sebagai calon gubernur Sumsel 2024 adalah Heri Amalindo yang saat ini menjadi Bupati PALI. Heri bahkan telah membentuk posko pemenangan yang diberi nama Rumah Bersama Heri Amalindo.

Ketua Tim Pemenangan, Firdaus Hasbullah, menjelaskan, mereka sering mendapat pertanyaan mengapa provinsi yang kaya masih memiliki masyarakat yang tidak sejahtera. Tanpa meremehkan pembangunan lima tahun terakhir, mereka

prihatin dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, Firdaus berpendapat bahwa Sumsel membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki visi untuk masa depan.

Firdaus menegaskan, Heri Amalindo memiliki kapasitas untuk

meneruskan kejayaan Sumsel seperti yang dicapai oleh Gubernur Alex Noerdin. Pada masa itu, Sumsel menjadi pusat olahraga, budaya, pariwisata, perdagangan, dan industri dan dikenal baik di Indonesia maupun internasional.

Salah satu fokus utama Heri Amalindo adalah mengembalikan program berobat dan sekolah gratis. Apalagi, hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 69 persen masyarakat masih menginginkan program ini.

Selain itu, Heri berencana untuk mengatur ulang regulasi terkait program berobat dan sekolah gratis, sehingga masyarakat miskin dapat tercakup oleh program BPJS tanpa perlu membayar setiap bulan.

Firdaus juga membahas program infrastruktur berkelanjutan, terutama jalan dan jembatan. Heri Amalindo dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang infrastruktur ini. Selain program-program tersebut, Heri Amalindo telah menerima masukan dan saran dari berbagai tokoh Sumsel.

Firdaus menyoroti bahwa Sumsel, meskipun merupakan salah satu provinsi terkaya kelima, namun juga kategori provinsi termiskin kesepuluh di Indonesia.

Oleh karena itu, program-program yang berfokus pada sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat mengatasi masalah ini.

Dia juga menekankan pentingnya mengembalikan kejayaan Sriwijaya FC dan memaksimalkan potensi pariwisata Sumsel. ●





“Semoga Pilkada 2024 aman, tentram, damai terpilih lagi Pak Wagub (Steven Kandouw)”

Olly Dondokambey

Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara 2024

**PERSAINGAN KETAT
STEVEN KANDOUW VS ELLY LASUT**

Nama-nama bakal calon gubernur Sulawesi Utara pada Pilkada 2024 kini mulai menarik perhatian. Sejumlah kepala daerah yang kini masih menjabat dikabarkan bakal maju menjadi orang nomor satu di Daerah Nyiur Melambai itu.

Nama-nama bakal calon gubernur Sulawesi Utara pada Pilkada 2024 kini mulai menarik perhatian. Sejumlah kepala daerah yang kini masih menjabat dikabarkan bakal maju menjadi orang nomor satu di Daerah Nyiur Melambai itu.

Sejumlah nama potensial calon gubernur Sulawesi Utara di antaranya Wakil Gubernur Steven Kandouw; Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut; Ketua TP PKK Sulut, Rita Maya Dondokambey Tamuntuan; Mantan Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Paruntu; Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap; Wali Kota Manado, Andrei Angouw; mantan Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, dan mantan Wali Kota Manado, Vicky Lumentut.

Elly Engelbert Lasut menjadi nama yang sering disebut dan dari beberapa hasil survei menunjukkan popularitasnya yang tinggi di kalangan publik.

Namun, banyak yang berpendapat bahwa pemenang dalam Pilgub Sulut 2024 sangat bergantung pada hasil dari Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Ada beberapa faktor yang dianggap penting dalam memprediksi hasil Pilgub Sulut 2024.

Pertama, Partai Demokrat perlu memperoleh setidaknya 20 persen suara atau minimal sembilan kursi di DPRD Sulut. Hal ini merupakan persyaratan agar Partai Demokrat yang dipimpin oleh Elly Engelbert Lasut di Sulut dapat mengusulkan calon gubernur dari partai mereka sendiri.

Namun, jika partai ini tidak berhasil memperoleh sembilan kursi di DPRD Sulut, peluang Elly Engelbert Lasut untuk maju dalam Pilgub agak terhambat. Karena dalam situasi ini, partai tersebut harus membentuk koalisi dengan partai lain.

Kemungkinan lain adalah partai-partai lain memilih untuk berkoalisi dengan PDIP. Hal ini dapat membuka peluang bagi seorang calon gubernur dari PDIP untuk bersaing tanpa adanya calon dari partai lain.

Faktor kedua yang sangat berpengaruh adalah hasil Pilpres 2024. Jika PDIP berhasil memenangkan Pilpres,

Elly Engelbert Lasut akan menghadapi tantangan, terutama jika Partai Demokrat tidak memperoleh sembilan kursi di DPRD Sulut.

Namun, jika hasil Pilpres tidak dimenangkan oleh PDIP, maka partai-partai lain akan lebih berani dalam mendukung Elly Engelbert Lasut atau membentuk koalisi dengannya.

Terkait PDIP, nama Wakil Gubernur Steven Kandouw telah disebut oleh Gubernur Olly Dondokambey sebagai calon yang layak untuk meneruskan estafet kepemimpinan.

Olly Dondokambey bersama PDIP diyakini akan habis-habisan memenangkan mantan Ketua DPRD Sulut untuk meneruskan tongkat estafet sebagai Gubernur Sulut selanjutnya.

Meski demikian, Steven bakal mendapat batu sandungan dari kompetitornya, seperti Elly Engelbert Lasut yang dianggap sebagai lawan berat karena bupati dua periode Kepulauan Talaud ini memiliki basis militan dan pendukung fanatik.

Namun, apabila diberikan tugas oleh PDIP, spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi pendamping Steven Kandouw, mantan Ketua DPRD Sulawesi Utara, telah menarik perhatian.

Dalam hal ini, pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara, Taufik Manuel Tumbelaka, menyampaikan beberapa pilihan yang mungkin. Dia mengungkapkan beberapa opsi yang mungkin untuk menjadi 'pendamping' Steven Kandouw.

Pertama, dari kalangan internal partai, terdapat beberapa kader potensial yang bisa dianggap. Bupati Minahasa Utara, Jouné Ganda, dan Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap, adalah beberapa nama yang muncul.

“Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung yang berhasil mengembalikan kejayaan PDIP di Kota Bitung, juga bisa menjadi pilihan,” katanya.

Selanjutnya, Tumbelaka menyebutkan opsi lain dari kalangan birokrat. Kepala Dinas Sosial Sulawesi Utara, Rinny Tamuntuan, yang saat ini memegang amanah sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, serta Gammy Asiano Kawatu (AGK), seorang birokrat senior yang baru saja pensiun merupakan opsi yang layak dipertimbangkan.

AGK pernah menjadi kandidat di Pilkada Minahasa Selatan. Meskipun tidak berhasil memenangkan pemilihan, dia meraih kemenangan di putaran pertama.

Tumbelaka menekankan, baik Rinny Tamuntuan maupun Gammy Kawatu memiliki kekuatan politik dan kemampuan untuk bersinergi dengan Steven Kandouw dalam menjalankan pemerintahan.

Selanjutnya, Tumbelaka mengulas tentang kemungkinan melalui koalisi partai. Meskipun kecil, peluang koalisi tetap terbuka dan jika terjadi, peluang terbesar berada di Partai Golkar.

Dalam hal ini, nama Tetty Paruntu, mantan Bupati Minahasa Selatan yang telah memimpin dua periode, menjadi pilihan utama. Tetty Paruntu memiliki dukungan kuat di Minahasa Selatan dan telah berhasil membawa anaknya ke kursi DPR melalui pemilihan legislatif.

Namun, Tumbelaka menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya dipilih oleh PDIP untuk menjadi pendamping dalam Pilkada Gubernur, akan sangat dipengaruhi oleh hasil Pemilihan Presiden.

Gubernur Sulawesi Utara yang juga Ketua DPD PDIP Sulut, Olly Dondokambey, juga mengirim sinyal bahwa penerusnya di Pilkada 2024 terus mengarah pada Steven Kandouw.

“Semoga Pilkada 2024 aman, tentram, damai terpilih lagi Pak Wagub (Steven Kandouw). Dua periode saya bersama Steven. Steven sangat tahu apa yang saya perbuat dalam kebijakan kebijakan saya,” kata dia, Selasa, 25 Juli 2023.

Menurut Olly Dondokambey, masyarakat dapat melihat tentang sosok itu jikalau mereka puas dengan pemerintahannya. Dia menyebut masyarakatlah yang paling tahu siapa yang dapat melanjutkan kinerjanya.

“Kalau masyarakat puas dengan apa yang saya lakukan sebagai gubernur masyarakat sudah bisa melihat, yang bisa melanjutkan dengan baik ya siapa. Masyarakat yang berkeinginan, kalau mereka merasa saya dua periode bagus kebijakan sebagai gubernur tentunya bisa melihat yang paling tahu apa yang kita lakukan dan selama ini baik itu Wakil Gubernur,” katanya. ●IRY



“Nama-nama ini memiliki potensi kuat untuk menjadi calon paling berpengaruh dalam Pilgub Kaltim nanti”



Mukhradis Hadi Kusuma Jaya

Pemilihan Gubernur Kaltim 2024

UJI NYALI LAWAN ISRAN NOOR

Mendekati Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sejumlah kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur mulai aktif mempersiapkan diri untuk mendapatkan dukungan Masyarakat di Benua Etam.

Namun, siapa yang akan menjadi figur utama di Kaltim dalam persaingan sengit antara para calon gubernur potensial yang muncul dalam beberapa waktu terakhir? Lembaga riset dan strategi ARCHI belum lama ini merilis hasil survei terkait Pilgub Kaltim 2024.

CEO ARCHI, Mukhradis Hadi Kusuma Jaya, mengungkapkan enam nama yang diprediksi memiliki peluang besar untuk menjadi kontestan utama dalam Pilgub Kaltim 2024. Mereka nantinya akan bersaing melawan petahana Isran Noor.

“Nama-nama ini memiliki potensi kuat untuk menjadi calon paling berpengaruh dalam Pilgub Kaltim nanti,” ujar Mukhradis.

Isran Noor diperkirakan akan mencalonkan diri kembali sebagai gubernur Kaltim pada 2024. Pria yang dikenal tenang dan berpengalaman ini akan melanjutkan perjuangannya mengingat dukungan yang luas dari masyarakat Kaltim.

“Tahun 2024 akan menjadi tahun yang berbeda bagi masyarakat Kaltim. Selain karena munculnya banyak penantang, Kaltim juga akan menjadi provinsi yang menjadi basis Ibu Kota Nusantara, yang akan menjadi pusat pemerintahan modern Indonesia,” terangnya.

Mukhradis mengungkapkan, petahana akan menghadapi banyak lawan, terutama karena elektabilitasnya. Lawan-lawan politik petahana pun semakin bermunculan, terbuka bagi mereka yang bukan hanya figur biasa.

Terdapat enam kandidat kuat yang diprediksi akan maju dalam Pilgub Kaltim 2024.

Salah satunya adalah Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Partai Gerindra telah mengumumkan niatnya untuk mengusung Andi Harun sebagai calon gubernur dalam Pilgub Kaltim 2024.

Sekretaris DPD Partai Gerindra, Seno Aji, telah secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Andi Harun sebagai bakal calon gubernur Kaltim. “Tapi kemungkinan Samarinda masih menginginkan beliau,” ungkapnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Andi Harun telah menjabat sebagai Wali Kota Samarinda selama satu periode, masih ada potensi untuknya maju dalam Pilkada Samarinda.

Namun, peluang Andi Harun untuk maju dalam Pilgub Kaltim juga terbuka luas. Hal ini dikarenakan posisinya saat ini sebagai Ketua DPW Partai Gerindra Kaltim.

Dengan latar belakang Andi Harun yang merupakan kader partai dan memiliki pengalaman sebagai Wali Kota, ia akan menjadi salah satu kontestan potensial dalam pesta demokrasi tersebut.

Nama lain yang ikut populer adalah Rudy Mas’ud. Partai Golkar telah menyiapkan Rudy Mas’ud untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pilgub Kaltim 2024.

Dikenal sebagai legislator yang akrab dan suka menolong, Rudy Mas’ud dianggap berpotensi maju sebagai kandidat dari Partai Golkar. Elektabilitasnya juga mengalami peningkatan seiring dengan kegiatan politiknya dalam setahun terakhir.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan, hanya ada satu nama yang akan diusung sebagai calon gubernur Kaltim dari partai beringin.

Hasanuddin Mas’ud mengakui bahwa sebelumnya terdapat beberapa nama dengan dukungan suara terbanyak. Namun, Partai Golkar tetap bersatu dalam memberikan dukungan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud.

“Pada Pemilihan 2019, suara terbanyak diperoleh oleh Pak Makmur, diikuti oleh Pak Mahyudin yang sudah tidak dalam pertimbangan. Namun, rencana kami ke depan adalah untuk tetap mendukung Ketua kami,” katanya.

Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan bahwa untuk memperkuat posisi mereka dalam Pilkada 2024, partainya akan membentuk koalisi dengan partai lain.

“Kami pasti akan menjalin koalisi, mengikuti arahan nasional,” ujarnya.

Hasanuddin Mas’ud juga memastikan bahwa Partai Golkar memiliki dukungan kuat di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim, sehingga mereka yakin dapat memenangkan Pilkada.

“Kami memiliki kekuatan di semua wilayah, tanpa terkecuali,” tegasnya.

Mengenai Pilkada di tingkat kabupaten/kota, terkait dengan posisi wali kota dan bupati, Hasanuddin Mas’ud saat ini belum dapat memberikan informasi lebih lanjut. Hal ini karena pembahasan tersebut masih dalam lingkup internal partai.

“Kami akan membahasnya secara internal dalam partai. Saat ini kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut,” ujarnya.

Nama lainnya yang potensial maju di Pilgub Kaltim 2024 adalah Hadi Mulyadi yang saat ini menjabat sebagai wakil gubernur petahana. Hadi Mulyadi juga memiliki basis dukungan yang khas. Gaya kepemimpinannya yang santai dan santun telah memenangkan hati publik Kaltim.

Nama Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, belakangan ini juga muncul sebagai salah satu kandidat yang berpotensi maju dalam Pilgub Kaltim 2024. Dengan pengalaman panjang sebagai politisi, ia memiliki pemahaman mendalam terhadap politik Kaltim.

Ada juga Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, yang telah muncul dalam survei publik. Selain karena kinerjanya yang terkini, jaringan politiknya di Kaltim membuatnya menjadi kandidat yang dihitung dalam opini publik. Terlebih lagi, ia berhasil membagi pemilih di Kaltim.

Selanjutnya adalah Safaruddin yang merupakan seorang legislator dan mantan polisi. Pengaruh Safaruddin dalam mencuri simpati publik cukup besar. Kehadirannya yang dekat dengan masyarakat telah membuatnya muncul sebagai kandidat potensial dalam Pilgub Kaltim 2024. ●IRY



“Dari simulasi ini, di antara tujuh calon gubernur DKI Jakarta yang diuji, Gibran Rakabuming Raka menduduki peringkat teratas, diikuti oleh Bima Arya dan Emil Dardak”

Ali Rifan

TOKOH MUDA BERTARUNG DI PILKADA JAKARTA

Bursa calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 mencuatkan nama tokoh muda yang digadang-gadang akan bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di ibu kota.

Dari berbagai lembaga survei, sejumlah tokoh muda bermunculan, mulai dari Gibran Rakabuming, Bima Arya, Emil Dardak, Abdullah Azwar Anas, Ahmad Sahroni, hingga Witjaksono.

Hasil penelitian mengenai big data dan pemantauan media menunjukkan adanya pergeseran dalam paparan data terkait calon gubernur DKI Jakarta sejak Januari hingga Juni 2023.

Menurut Direktur PoliEco Digital Insights Institute, Anthony Leong, penelitian dilakukan untuk menganalisis perubahan data pemilih dalam konteks Pemilu dan Pilkada 2024.

“Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa dalam benak publik, nama calon gubernur DKI Jakarta 2024 yang paling mendominasi adalah Gibran Rakabuming dengan tingkat elektabilitas 31 persen, diikuti Ahmad Sahroni 27 persen. Namun, data yang kami analisis masih terbatas karena percakapan yang dominan masih berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2024,” ujar Anthony.

Selain nama-nama yang menjadi “Top of Mind” dalam pemilihan, terdapat beberapa tokoh lain yang masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta 2024. Mereka antara lain Tri Rismaharini, Heru Budi

Hartono, Grace Natalie, Ahmad Zaki Iskandar, Fadil Imran, Dudung Abdurachman, Airin Rachmi Diany, dan Erwin Aksa.

“Penelitian big data dan pemantauan media dapat menjadi salah satu referensi penting untuk mengukur elektabilitas dan popularitas dari perspektif digital,” ujar pakar digital tersebut.

Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) telah melaporkan hasil survei mereka mengenai penilaian kinerja dan proyeksi Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menurut hasil survei ini, dalam kelompok tokoh muda, Gibran Rakabuming menduduki peringkat pertama sebagai calon pilihan utama, diikuti oleh Bima Arya dan Emil Dardak yang juga populer di mata responden.

Direktur Eksekutif ASI, Ali Rifan, menjelaskan, hasil survei ini didapatkan melalui wawancara tatap muka yang dilakukan pada rentang waktu 11-18 Mei 2023.

“Kami juga melaksanakan simulasi dengan menggunakan kelompok tokoh muda. Dari simulasi ini, di antara tujuh calon gubernur DKI Jakarta yang diuji, Gibran Rakabuming Raka menduduki peringkat teratas, diikuti oleh Bima Arya dan Emil Dardak,” ungkap Rifan.

Terkait dengan hasil survei tersebut, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming merespons positif hasil survei ASI yang menempatkannya sebagai tokoh muda dengan peringkat tertinggi dalam daftar calon gubernur DKI Jakarta.

“Saya berterima kasih atas hasil survei dari lembaga ini. Namun, jika berbicara tentang status tokoh muda, saya sudah tidak muda lagi, mengingat saya sudah memiliki dua anak,” ujar Gibran.

Gibran juga mengungkapkan, pada saat ini, dia lebih fokus untuk menyelesaikan tugas sebagai pemimpin di Surakarta dan belum benar-benar memikirkan aspirasi politik yang lebih besar.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, telah mengungkapkan sejumlah kepala daerah yang masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan kader sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Kami mencari kepala daerah yang diyakini mampu membawa perubahan positif bagi daerahnya. Contohnya, seperti yang dilakukan oleh Mas Gibran,” ujar Gembong.

Menurut PDIP, Gibran adalah salah satu kepala daerah

yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan pemerintahan masa lalu di Solo dengan kepemimpinannya saat ini.

“Salah satu hal yang menonjol bagi kami adalah kemampuan Gibran dalam membangun kelanjutan pemerintahan dari masa sebelumnya dan mengadaptasikannya dengan baik dalam kepemimpinan saat ini, dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya,” ungkapnya.

Nama Ahmad Sahroni juga ramai diperbincangkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024. Partai NasDem akan mengukung Ahmad Sahroni untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2024.

“Ya, NasDem menyiapkan Sahroni,” ujar Wakil Sekjen NasDem, Hermawi Taslim.

Yang juga tidak kalah menyita perhatian adalah nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang ikut mencuat sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah mempertimbangkan untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat atau Pilgub DKI Jakarta.

Sang ibu, Tjutju Sukaesih, yang akrab dipanggil Maci, telah memberikan dukungan jika anaknya memutuskan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Namun, Ridwan Kamil menyatakan bahwa dukungan sang ibu hanya merupakan nasihat.

“Kalau Maci mah seorang ibu, pasti selalu memberi nasihat yang paling baik. Poinnya adalah mana yang terbaik. Kalau memang harus di tempat baru, ya pilihan DKI itu jadi sebuah nasihat, bukan berarti tidak ya karena per hari ini masih di Jabar,” ungkap Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Menurutnya, jika tidak kembali maju dalam Pilgub Jawa Barat, maka DKI Jakarta akan menjadi pilihan yang lebih rasional. Namun, dia juga berpendapat bahwa saat ini masih terlalu dini untuk mengambil keputusan tersebut. Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa ia akan menunggu hasil dari Pilpres dan Pilleg 2024.

“Jika ditanya mengenai pilkada, ini masih terlalu awal. Kita tunggu saja hingga bulan Februari karena persentase kursi partai dalam legislatif belum pasti, apakah bisa maju sendiri atau harus berkoalisi untuk mengukung calon gubernur. Oleh karena itu, masih ada waktu yang cukup panjang,” ulasnya. ●IRY



“Pada intinya akan ada verifikasi administrasi terlebih dahulu. Kemudian jika telah memenuhi syarat administrasi, baru dilanjutkan dengan verifikasi materil”

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi



Bawaslu Laporkan KPU ke DKPP

PENYELENGGARA PEMILU KOK RIBUT MELULU

Hubungan tak harmonis antara penyelenggara pemilu di Tanah Air kembali menjadi sorotan publik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Anggota Bawaslu, Totok Hariyono, mengungkapkan, laporan yang dilayangkan terhadap KPU masih berkaitan dengan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang tidak kunjung diberikan atau masih terbatas. Namun, saat ditanyakan bukti apa saja disampaikan kepada DKPP saat membuat laporan, Totok belum menjawabnya hingga saat ini.

Rencana Bawaslu untuk melaporkan KPU ke DKPP memang sudah ingin dilakukan sejak lama. Namun, Bawaslu masih melakukan kajian mendalam. Sebelumnya, Totok mengaku bahwa akses Silon yang diberikan KPU masih sangat terbatas. Salah satunya ketika melihat dokumen persyaratan dari para calon anggota legislatif (caleg).

“Masih sangat terbatas. Syarat-syarat calonnya belum bisa diakses,” kata Totok saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin, 7 Agustus 2023.

Dia menyatakan bahwa akses Silon memang telah diberikan, namun dibatasi dengan durasi. Misalnya, Bawaslu hanya bisa akses Silon dalam kurun waktu 15 menit.

“Karena kita masih dibatasi juga. Hanya seperempat jam liatnya. Dari 6 panel hanya 3 orang,” ungkapnya.

Maka dari itu, Bawaslu mengancam jika akses Silon tidak diberikan secara utuh, KPU akan diadukan ke DKPP. Padahal, sebelumnya Bawaslu sudah mengirimkan surat ketiga kepada KPU terkait permintaan akses Silon.

“Karena enggak bisa, ya sudah kita uji ke DKPP aja deh,” tegasnya.

Menurut Totok, KPU mengklaim telah memberikan akses Silon kepada Bawaslu. Namun di satu sisi, Bawaslu tingkat kabupaten/kota belum mendapatkannya. Atas dasar itu, Bawaslu ingin menguji pernyataan KPU yang telah

memberikan akses Silon kepada Bawaslu di seluruh tingkatan.

“Apakah yang disampaikan KPU ini sudah sesuai asas penyelenggara pemilu apa melanggar etik enggak. Tentu kita juga enggak gegabah. Kita lakukan kajian dulu, karena ini pelanggaran undang-undang yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan Bawaslu terhadap KPU.

“Aduan dari Bawaslu disampaikan ke DKPP kemarin, Senin, 7 Agustus 2023 sore,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa, 8 Agustus 2023.

Dia menyebut, DKPP saat ini masih mengkaji laporan yang dilayangkan oleh Bawaslu. Sebab, seluruh laporan yang disampaikan ke DKPP harus memenuhi syarat formil dan materil.

“Saat ini masih dalam proses. Mekanisme penanganan aduan yang masuk ke DKPP diatur dalam Peraturan DKPP tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, sebelum ditindaklanjuti oleh DKPP, laporan tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi.

“Pada intinya akan ada verifikasi administrasi terlebih dahulu. Kemudian jika telah memenuhi syarat administrasi, baru dilanjutkan dengan verifikasi materil,” katanya.

Dia menyebutkan, Bawaslu melaporkan seluruh pimpinan KPU. Bawaslu menilai, pimpinan KPU telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

“Betul, semua diadukan,” ungkapnya.

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan, menjadi hal sangat wajar bila lembaga yang ia pimpin itu diadukan ke pengadilan pemilu. Sebab, pada dasarnya

KPU akan menjadi Teradu di

DKPP dan Terlapor di Bawaslu.

“Penting untuk dinyatakan bahwa dengan mengingat posisi KPU yang selalu berada dalam posisi “Ter” dalam semua proses peradilan pemilu,” kata Hasyim saat dikonfirmasi, Selasa, 8 Agustus 2023.

Dia menuturkan, diadukannya KPU ke DKPP ini menunjukkan bahwa pihaknya harus bekerja lebih optimal dan tidak masuk ke dalam konflik kepentingan.

“Menandakan bahwa KPU dituntut dan wajib bekerja secara optimal, menghindari konflik kepentingan, serta bekerja penuh kecermatan dan kehati-hatian. Dengan begitu, KPU selalu siap dalam segala kondisi dan posisi apapun, khususnya ketika berhadapan dengan lembaga lain dalam suatu proses peradilan,” terangnya.

Dia menyampaikan, konsekuensi atas posisi KPU sebagai pihak “Ter” dalam semua proses peradilan pemilu membuat pihaknya harus ambil keputusan, meskipun nantinya akan bertentangan dengan putusan pengadilan pemilu.

“Maka bukan tidak mungkin KPU dihadapkan pada posisi yang mengharuskannya mengambil pilihan di antara berbagai putusan pengadilan yang dapat saja saling bertentangan,” katanya.

Dia menuturkan, dalam keputungan pengadilan pemilu, KPU secara kuat harus tetap bertahan dan siap menghadapi berbagai laporan. “Berpedoman pada asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu serta supremasi konstitusi dalam segala kondisi,” jelasnya.

Anggota KPU, Idham Holik, menyampaikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 PKPU 10/2023, seluruh

KPU di semua tingkat harus memberikan akses Silon kepada Bawaslu.

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses

pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Dia menyampaikan, poses pengundangan sebuah peraturan telah menempuh legal drafting yang Panjang, di mulai dari uji publik, rapat konsiyering dan konsultasi dengan pembentuk undang-undang, serta rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham.

“Dalam legal drafting tersebut, Bawaslu senantiasa diundang dan hadir,” jelasnya.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU ini menjelaskan, dalam surat KPU kepada Bawaslu tertanggal 18 Juli 2023, pihaknya menegaskan bahwa KPU akan melayani kegiatan pengawasan Bawaslu selama 24 jam per hari. KPU juga akan memberikan akses Silon kepada Bawaslu apabila memiliki informasi awal dugaan pelanggaran terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan manajemen pencalonan anggota legislatif yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu, KPU harus mempedomani Pasal 17 huruf g dan h UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dia menyampaikan, dalam konteks pengawasan pencalonan, Bawaslu dapat mendalami informasi dugaan dokumen persyaratan pencalonan yang diragukan keabsahannya.

KPU akan melayani pelaksanaan kewenangan atributif tersebut sebagaimana surat KPU kepada Bawaslu, 18 Juli 2023, Pasal 251 UU 7/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).●





“Jadi cara-caranya yang eleganlah, KPU jangan cuma teriak-teriak soal anggaran, tapi dia sendiri tidak terbuka soal anggaran”

Kaka Suminta

KPU TUNTUT ANGGARAN, TAPI ENGGAK MAU TRANSPARAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluhkan dana operasional pemilu tahun anggaran 2023 yang masih tersendat di Kementerian Keuangan sebesar Rp 3 triliun. KPU sebelumnya juga telah mengusulkan anggaran tahapan pemilu pada 2023 sebesar Rp23,8 triliun.

Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, mengatakan, dari total anggaran tersebut, Kementerian Keuangan per Agustus 2023 baru mencairkan sekitar Rp15,9 triliun. Artinya, sisa anggaran yang belum dikucurkan oleh Kemenkeu sekitar Rp7 triliun.

Drajat mengungkapkan, anggaran Rp15,9 triliun yang dikucurkan itu saat ini telah habis terpakai guna membiayai kegiatan dari tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah dimulai pada awal Januari hingga akhir Juli 2023.

“Ini anggaran 2023 pertama cair Rp15,9 triliun dari usulan anggaran 23,8 triliun. Kekurangan itu Rp7 triliun kan. Berikutnya kami ajukan lagi 4 triliun untuk honor badan adhoc. Yang Rp15,9 triliun itu hanya sampai di bulan Juli, Agustus September belum teralokasi,” kata Yulianto, Selasa, 8 Agustus 2023.

Selain itu, Drajat mengatakan, KPU saat ini masih menunggu anggaran sebesar Rp3 triliun yang diperuntukan dalam rangka membiayai kegiatan sarana dan prasarana pengembangan sistem informasi teknologi.

“Jadi, kekurangannya Rp3 triliun lagi. Kami usulkan lagi untuk dukungan sarana prasarana dokumen sosialisasi dan pengembangan IT. Ini masih berproses,” tutur Yulianto.

Drajat menambahkan, selain menunggu anggaran Rp3 triliun itu dikucurkan, pihaknya saat ini juga kembali mengajukan dana anggaran sebesar Rp4 triliun untuk pembayaran honor badan Adhoc.

Sebelumnya, polemik anggaran pemilu antara KPU dan Kemenkeu tak hanya terjadi pada tahun ini. Polemik itu juga pernah muncul pada pertengahan 2022. Saat itu, KPU juga mengeluhkan ikhwal belum cairnya anggaran dana 2022.

Pada 2022, KPU mengusulkan anggaran Rp4,4 triliun guna membiayai kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, saat itu, Kemenkeu han-

ya mencairkan dana operasional sarana prasarana KPU sebesar Rp3,6 triliun.

Berkaitan dengan hal itu, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu, Kaka Suminta, menilai, polemik ikhwal tersendatnya anggaran kepililuan tahun anggaran 2023 merupakan masalah kedua Lembaga, yakni KPU dan Kemenkeu, yang harus segera diselesaikan.

Kaka mengatakan, sejauh ini Kemenkeu dalam beberapa kali kesempatan memastikan bahwa pengucuran anggaran pemilu tidak akan ada masalah.

Berdasarkan hal itu, Kaka juga menilai bahwa kabar tersendatnya anggaran pemilu ini harus dijelaskan terlebih dahulu oleh KPU mengenai apa yang menjadi titik berat perihal masalahnya.

“Jadi kalau kita perhatikan kalau dari struktur anggaran harusnya tidak ada masalah, harusnya ya tidak ada masalah, tinggal masalah untuk mengalokasikannya saja, sesuai dengan timing dan sesuai dengan schedule pembiayaan,” kata Kaka saat dihubungi, Kamis, 10 Agustus 2023.

“Kalau peluncurannya tidak lancer, itu biasanya ada hambatan ya, hambatan tersebut biasanya soal administratif. Jadi saya pikir ini bukan soal program, tapi soal administrasi antara KPU dan kebijakan mengucurkan uang di Kemenkeu. Jadi, kalau dari sisi anggaran Kemenkeu selalu bilang cukup dan ada anggarannya,” sambung Kaka.

Di sisi lain, Kaka juga turut mengkritik sikap KPU yang selama ini dinilai tidak terbuka perihal anggaran kepililuan. Sebagai kelompok aktivis yang bergerak sebagai pemerhati pemilu, Kaka melihat perencanaan dan pengajuan anggaran kepililuan tak pernah dibuka secara spesifik kepada publik.

Sikap ketidakterbukaan KPU perihal anggaran tersebut, menurut Kaka, menjadi salah satu awal penyebab sumber masalah yang kerap timbul dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu lima tahun sekali.

“Jadi pengajuan anggarannya sering kali juga kalau kita perhatikan itu banyak masalah. Jadi ini juga harus menjadi oto kritik untuk KPU agar dapat berbenah. KPU teriak kalau anggaran tersendat, tapi KPU sendiri tidak pernah terbuka soal anggaran. Nah itu problemnya,” terangnya.

Kendati demikian, Kaka mengatakan, apabila

problem tersendatnya anggaran pemilu lantaran kebijakan, meskinnya harus dapat diselesaikan oleh kedua lembaga tersebut. Hal itu harus dilakukan agar jangan sampai persoalan kebijakan administrasi dapat menghambat pelaksanaan Pemilu 2024.

Kaka juga melihat permasalahan anggaran tersendat ini diduga bisa juga terjadi karena pengelolaan yang kurang mumpuni. Sejauh ini, pemerintah melalui Kemenkeu sejatinya telah berkomitmen untuk menyediakan anggaran kepililuan sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana, baik saat proses tahapan atau penyelenggaraan Pemilu 2024.

Adapun penyebab lain perihal munculnya polemik anggaran pemilu tahun anggaran 2023 yang tersendat diduga lantaran postur anggaran yang diajukan oleh KPU kurang ideal. Sebagai pihak yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu, KPU dapat mengatur pengalokasian dan mengefisienkan anggaran untuk pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2023.

Kaka menambahkan, porsi peluncuran anggaran kepililuan merupakan kewenangan pemerintah yang diwakili Kemenkeu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan biaya proses tahapan pe-

nyelenggaraan Pemilu 2024.

“Kalau saya perhatikan si postur anggarannya dari KPU itu kurang ideal. Menurut saya itu harusnya anggaran itu ada yang diefisienkan. Ya tapi okelah kalau itu merupakan sebuah kesepakatan. Biasanya kan kalo ada catatan tentang kenapa anggaran meluncurnya tidak sesuai, ya itu tentu wewenangnya Kemenkeu,” ujarnya.

Kaka melihat, pemerintah melalui Kemenkeu sejauh ini sudah menjamin bahwa seluruh keterbutuhan anggaran kepililuan akan tersedia dan tidak akan tersendat. Maka dari itu, munculnya problem tersendatnya anggaran kepililuan harus menjadi titik balik untuk KPU agar ke depannya dapat terbuka.

“Jadi, sebaiknya KPU itu lebih terbuka lah soal anggaran biar kita juga bisa melihat dan kalau tersendat seperti ini kita juga lebih mudah untuk membantu advokasinya,” imbuhnya.

Menurutnya, keuntungan azas keterbukaan terhadap publik itu, misalnya perihal tersendat anggaran, masyarakat dapat melihat titik mana yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut. Sehingga KPU atau Kemenkeu dapat menyelesaikan polemik ini dengan berdialog bersama.

“Jadi kalau menurut saya ini justru KPU sendiri yang membuat tidak lancar ya. Seakan-akan pruden tapi prudennya tidak jelas soal apa. Jadi banyak hal juga dipending sama KPU. Nah yang kaya gini kan aneh,” tutur Kaka.

“Jadi, KPU itu harus terbuka dulu anggarannya. Lalu kita buka juga nanti di mana hambatannya. Jangan sampai karena hal itu jadi malah berdampak terhambat penyelenggaraan Pemilu,” lanjut Kaka.

Kaka menambahkan, sebagai pihak penyelenggara Pemilu, KPU harus lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran dan tak perlu membangun narasi yang kurang elegan dalam konteks anggaran kepililuan.

“Jadi cara-caranya yang eleganlah, KPU jangan cuma teriak-teriak soal anggaran, tapi dia sendiri tidak terbuka soal anggaran,” tutur Kaka. ●



“Permintaan-permintaan akan terus meningkat, terutama kebutuhan calon-calon legislatif, usaha percetakan, sembako, fesyen akan terjadi permintaan”

Sri Rahayu



TAHUN POLITIK DONGKRAK EKONOMI RAKYAT

Perhelatan Pemilu 2024 tak hanya menjadi panggung bagi para elit politik untuk memenangkan kontestasi, tapi juga berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi.

Kebutuhan alat peraga kampanye, publikasi hingga program-program pengenalan calon-calon wakil rakyat, kepala daerah dan presiden, diyakini akan memberikan keuntungan besar bagi para pelaku bisnis di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumsel, Ricky Perdana Ghozali, menuturkan, jika dilihat dari data-data di tahun politik sebelumnya, pertumbuhan ekonomi akan meroket dan positif, terutama ekonomi kerakyatan yang merambah hingga ke sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Di tahun demokrasi, konsumsi akan naik drastis, seperti pembelian spanduk, kaos partai, flyer, kampanye, media dan lainnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan, konsumsi naik dibarengi dengan produksi yang naik juga,” ucapnya.

Tingginya konsumsi kebutuhan kampanye di tahun-tahun politik tersebut juga akan berimbas pada penyerapan tenaga kerja yang meningkat. Karena produktivitas akan meningkat drastis, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang bisa mengelolanya.

Pertumbuhan ekonomi di tahun politik akan berbanding terbalik dengan kondisi sosial. Untuk itu, Bank Indonesia Perwakilan Sumsel akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan stakeholder, agar tetap menjaga di dua sektor tersebut, yakni sosial dan ekonomi.

“Kita setiap bulan pasti selalu membahas soal Stabilitas

Sistem Keuangan (SSK), tahun demokrasi juga menjadi perhatian kita,” ujarnya.

Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Sri Rahayu, mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 bisa mencapai 5,3-5,7 persen.

Jika dibandingkan dengan lokal, target pertumbuhan ekonomi tersebut tidak akan sulit diwujudkan. Terlebih dengan masuknya tahun politik yang membuat perekonomian rakyat akan meningkat drastis.

Dia pun setuju dengan statement dari Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumsel Ricky Perdana Ghozali yang menyebutkan 2024 akan ada pertumbuhan ekonomi yang membaik di Bumi Sriwijaya.

“Permintaan-permintaan akan terus meningkat, terutama kebutuhan calon-calon legislatif, usaha percetakan, sembako, fesyen akan terjadi permintaan. Inilah yang akan menggeliatkan tingkat ekonomi Sumsel, bahkan mungkin target peningkatan perekonomian nasional bisa kita capai,” ujarnya.

Dia mengakui, tren peningkatan perekonomian daerah dari tahun-tahun politik sebelumnya selalu terjadi. Hal itulah

yang menjadi penyumbang pergerakan ekonomi daerah, yang akan membuat para pelaku usaha mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Terlebih setelah dampak dari Pandemi Covid-19 yang memporak porandakan perekonomian Indonesia. Tahun politik inilah yang menjadi peluang bagi UMKM untuk bangkit kembali

memperbaiki perekonomian, bahkan mencari keuntungan dari kebutuhan para elit politik.

Namun untuk saat ini, Sri Rahayu belum merasakan ada gejala peningkatan perekonomian. Apalagi Daftar Calon Tetap (DCT) belum diumumkan. Namun jika sudah diumumkan, di situlah akan mulai terjadi peningkatan ekonomi.

“Mungkin di akhir 2023 dan awal 2024 sudah ada progress perkembangan ekonomi di Sumsel. Apalagi ini jadi peluang bagi calon-calon pebisnis yang baru mau mengembangkan UMKM-nya,” ungkapnya.

Sri Rahayu juga memprediksi, kondisi ekonomi pasca-tahun politik, yakni di 2025 juga tidak akan berubah drastis dibandingkan 2024. Kemungkinan para pemenang dari Pemilu 2024 akan membuat berbagai program yang menysasar masyarakat sekitar. Mulai dari pembinaan, bantuan dan lainnya, yang akan kembali mendongkrak perekonomian. UMKM juga akan turut digandeng di berbagai event politik yang kian membuat perekonomian daerah stabil.

“Para pelaku usaha bisa memanfaatkan situasi ini, apalagi diprediksi akan banyak UMKM yang lahir. Tapi kita harus mewaspadai kondisi sosial dari tahun politik ini. Sebaiknya, jangan hanya memberikan kesempatan bagi UMKM, tapi juga bagi pekerja yang mendapatkan upah di bawah UMR juga,” ujarnya.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan mencatat, ekonomi Sumsel pada triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,24 persen (y-on-y).

Dari sisi produksi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum memasuki tahun politik ini mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,91 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) yaitu sebesar 9,48 persen.

Kepala BPS Sumsel, Mohammad Wahyu Yulianto, mengatakan, ekonomi Sumsel pada triwulan II-2023 jika dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,57 persen (q-to-q).

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,86 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 40,38 persen

Perekonomian Sumsel masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Pengalihan sebesar 27,12 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 17,55 persen, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,51 persen.

“Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Selatan mencapai 58,18 persen. Perekonomian Sumatera Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp158,88 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp90,59 triliun,” katanya.

Pertumbuhan ekonomi Sumsel triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali jasa kesehatan dan pengadaan air yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 3,15 persen dan 2,71 persen.

“Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,91 persen, diikuti administrasi pemerintahan sebesar 10,94 persen, pertambangan dan pengalihan sebesar 10,36 persen, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,13 persen serta informasi dan komunikasi sebesar 7,08 persen,” tuturnya.

Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 2,14 persen dan 1,97 persen.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi semester I-2023 terhadap semester I-2022 (c-to-c), mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali pengadaan air yang berkontraksi sebesar 1,87 persen. ●





“Kami menyiapkan kesiapan Polri dalam pemilu. Menyiapkan personilnya, menyiapkan sarana prasarana, menyiapkan metode yang kami pakai”

Irjen Sandi Nugroho

SATGAS ANTI MONEY POLITIC CEGAH “SERANGAN FAJAR”

Pemilu 2024 kemungkinan terancam akan dinodai dengan adanya aksi politik uang atau money politic. Hal itu berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk bisa mengantisipasi kecurangan dari oknum-oknum tak bertanggung jawab pada Pemilu 2024, Polri sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Money Politic. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menuturkan, dengan adanya Satgas Anti-Money Politic diharapkan bisa mengantisipasi praktik politik uang yang berisiko menimbulkan kegaduhan saat pemilu, bahkan hasilnya bisa tidak adil.

Ada beberapa langkah yang disiapkan Polri melalui Satgas Anti-Money Politic untuk pengamanan Pemilu 2024 agar pesta demokrasi tersebut bisa berjalan kondusif, aman dan lancar hingga akhir.

Polri akan menyiapkan anggota kepolisian dengan menggunakan sandi Operasi Mantap Brata yang sering digunakan secara rutin setiap perhelatan Pemilu. Sandi Operasi Mantap Brata itu diyakini akan efektif untuk pengamanan selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

Tak berhenti di situ, petugas kepolisian juga bertugas untuk menangkalkan berita bohong, mencegah terjadinya politik identitas, dan polarisasi masyarakat. Langkah tersebut ternyata merupakan perintah langsung dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Kami menyiapkan ke-

siapan Polri dalam pemilu. Pertama dengan menyiapkan personilnya, menyiapkan sarana prasarana, menyiapkan metode yang kami pakai. Menyiapkan komunikasi dengan masyarakat, menyiapkan komunikasi dengan stakeholder terkait lainnya,” katanya.

Ada lagi satgas pengamanan pemilu yang bernama Satgas Nusantara. Berbeda dari Satgas Anti-Money Politic, Satgas Nusantara bertujuan untuk cooling system, yakni bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, mencegah terjadinya polarisasi mencegah kampanye hitam dan berita bohong yang timbul yang berkepanjangan untuk bisa menjamin terselenggaranya pemilu dengan baik.

Keamanan yang terjamin, lanjut Sandi Nugroho, akan menjadi kunci utama Pemilu 2024 berjalan secara sehat dan baik. Apalagi pada 2024, pemilu digelar serentak, yakni Pilpres, Pileg, dan Pilkada.

Jadwal pemungutan suara sudah tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 21 Tahun 2022. Untuk Pileg dan Pilpres 2024, sudah ditetapkan KPU pada Rabu, 14 Februari 2024. Sementara untuk Pilkada dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024.

Ada banyak hal penting selama

Pemilu 2024 berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Pertama, Perencanaan Program dan Anggaran digelar pada 14 Juni 2022 hingga 14 Juni 2024. Kedua, Penyusunan Peraturan KPU pada 14 Juni 2022 hingga 14 Desember 2023.

Ketiga, Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih pada 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023. Keempat, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu pada 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022. Kelima, Penetapan Peserta Pemilu pada 14 Desember 2022 hingga 14 Februari 2022.

Keenam, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pada 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Ketujuh, Pencalonan Anggota DPD pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023.

Kedelapan, Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di pada 24 April hingga 25 November 2023. Kesembilan, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Untuk masa kampanye akan digelar pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Lalu, akan ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024.

Di masa tenang ini, seluruh calon dan timmesnya tidak

boleh lagi melakukan kampanye secara terang-terangan atau terselubung.

Hingga pada akhirnya, KPU setiap daerah akan melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Ada juga penetapan hasil pemilu paling lambat tiga hari setelah pemberitahuan MK atau tiga hari setelah putusan MK. Lalu pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024 disusul pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Mengantisipasi terjadi berbagai masalah di Pemilu 2024, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Rachmad Wibowo, telah melakukan peningkatan pengamanan dan memastikan Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024 berlangsung aman dan kondusif.

“Kondisi ini akan terus dipertahankan dengan mengantisipasi berbagai hal yang dapat mengganggu Kamtibmas,” ujarnya, Jumat, 11 Agustus 2023.

Menurut Rachmad, untuk mengantisipasi berbagai hal yang dapat mengganggu Kamtibmas, maka perlu dilakukan peningkatan mulai dari peningkatan kesiapsiagaan personel serta sarana dan prasarana seluruh jajaran di Sumatera Selatan.

Dengan kondisi Kamtibmas yang bisa terpelihara dengan baik, diharapkan dapat mendukung terwujudnya pesta demokrasi rakyat Indonesia.

“Melihat kesiapan personel Polda Sumsel serta adanya dukungan dari masyarakat, kami optimistis dapat menjaga Kamtibmas dengan baik menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak pada 2024,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Polda Sumsel ini mengatakan, melalui upaya tersebut diharapkan Kamtibmas dapat terus terpelihara baik dengan kondisi yang aman dengan menempatkan 3.798 personel menjadi polisi RW. Hal itu bertujuan mengatasi permasalahan keamanan yang berpotensi muncul dari basis komunitas terendah yakni lingkungan RW.

Program polisi RW merupakan inovasi positif yang mana polisi RW hadir di tengah masyarakat untuk melakukan penyelesaian masalah dengan cara mendengar keluhan atau aduan masyarakat. Baik itu terkait kejahatan atau tindak kriminalitas, sekaligus berupaya mencari solusi dan mencegah terbentuknya potensi kejahatan dengan cara menganalisa bersama masyarakat tentang gangguan keamanan, mulai dari geografis, demografis, dan lainnya.

“Tetap optimis kita jaga ketertiban masyarakat yang kondusif saat Pemilu nanti,” pungkasnya. ●



“Pimpinan MPR juga sepakat amendemen UUD tidak dilaksanakan sebelum Pemilu 2024”



Hidayat Nur Wahid

USULAN TUNDA PEMILU MUNCUL LAGI

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan mengusulkan amendemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Amendemen terbatas tersebut bertujuan untuk memasukkan usulan penundaan pemilu di masa darurat.

Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, mengatakan, usulan tersebut berkaca pada pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap seluruh sektor di Indonesia. Apalagi, konstitusi saat ini belum mengatur penundaan pemilu pada masa-masa seperti itu.

“Kalau kita mengacu pada UUD yang sekarang, katakanlah akibat kedaruratan itu pemilu enggak mungkin dilaksanakan. Nah, kalau kita mengacu pada UUD yang sekarang ini kan enggak ada aturannya,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2023.

Jika hal tersebut tak diatur, maka akan muncul potensi pembangkangan masyarakat di tengah masa-masa darurat seperti itu. Sebab, tidak mungkin memaksakan pelaksanaan pemilu di tengah kegentingan, seperti pandemi dan gempa besar.

Adapun usulan amendemen tersebut akan disampaikan di Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2023. Harapannya, lewat kajian dan pembahasan dengan banyak kalangan itu, MPR akan mendapatkan kewenangan tersebut lewat amendemen terbatas.

“Kami berharap

MPR itu punya kewenangan, artinya tempat memutuskan mencari jalan keluarnya itu harus ada di MPR. Termasuk misalnya kewenangan untuk ‘oke kita tunda’, menyatakan itu ditunda, tetapi itu beberapa bulan dan segala macam,” ujar Arsul.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa usulan amendemen terbatas terhadap UUD 1945 bukan untuk menunda Pemilu 2024. MPR tetap berkomitmen terhadap pelaksanaan kontestasi nasional 14 Februari 2024.

“Bahwa amendemennya itu nanti setelah MPR hasil Pemilu (2024), itu soal lain. Tapi ini lho harus ada yang kita pikirkan, gagasan itu harus kita lempar dari sekarang. Supaya orang itu tidak curiga, ini jangan-jangan mau menunda pemilu lagi, makanya kita tegaskan dulu di sidang tahunan posisi MPR itu pemilu yang 14 Februari itu harus on time,” tegasnya.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, juga mengatakan, rencana amendemen UUD 1945 akan dibahas setelah Pemilu 2024.

“Sangat tergantung pada kesepakatan kami, partai politik yang ada. Untuk sementara, kesepakatan adalah kami bahas nanti setelah pemilu,” kata Bamsoet, saingan akrab Bambang Soesatyo, setelah pertemuan antara pimpinan MPR dan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2023.

Bamsoet

mengaku khawatir jika amendemen UUD dibahas dalam waktu dekat menjelang Pemilu 2024, akan memicu timbulnya kecurigaan terkait dengan dicantumkannya pasal perpanjangan masa jabatan presiden dalam proses amendemen UUD.

“Karena kalau sekarang, takutnya bukan apa, dicurigai untuk perpanjang masa jabatan presiden, untuk apa lagi? Penundaan pemilu dan seterusnya,” ujarnya.

Jika timbul polemik dengan wacana amendemen UUD, kata dia, malah akan menimbulkan hal-hal yang akan kontraproduktif dengan kondisi saat ini yang sedang menjelang Pemilu 2024. “Kami berkesimpulan bahwa membahas amendemen UUD nanti pasca-pemilu,” ujar Bamsoet.

Bamsoet menegaskan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi tidak membahas mengenai amendemen UUD. Kedatangan para pimpinan MPR untuk menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan guna menyampaikan persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2023.

“Tak ada. Kami enggak menyampaikan, kami hanya menyampaikan bahwa Pak Arsul (Wakil Ketua MPR) menyampaikan, ya, itu domainnya MPR, domainnya partai-partai politik yang ada di parlemen,” kata dia.

Bamsoet mengakui, pada 8 Agustus 2023, MPR memang membahas kemungkinan amendemen UUD, di antaranya mengenai pentingnya keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, diputuskan bahwa amendemen UUD tidak akan diusulkan dalam waktu dekat menjelang Pemilu 2024.

“Yang pasti kemarin kami bicara soal pentingnya PPHN untuk perjalanan bangsa ini ke depan. Pertanyaan kemudian apakah pembahasan ini dilakukan sebelum pemilu atau setelah pemilu, kami sepakat kemarin untuk membahas Pokok-Pokok Haluan Negara yang tinggal satu langkah lagi, yaitu pembentukan panitia ad hoc di sidang paripurna MPR, kami tunda selesai pemilu,” kata Bamsoet.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menjelaskan, penundaan pemilu saat masa darurat masih berupa usulan materi yang bergulir di pimpinan MPR. Ia mengaku, bukan merupakan usulan resmi MPR untuk melakukan amendemen terbatas terhadap UUD 1945.

“(Menunda pemilu pada masa darurat) kalau hanya dengan undang-undang kan tidak bisa, karena ketentuan pemilu lima tahun sekali adanya di UUD, tidak bisa dikalahkan UU. Kalau melalui perppu, juga tidak bisa menganulir ketentuan konstitusi, apalagi legitimasi politiknya juga sangat rendah,” ujar Hidayat, Kamis, 10 Agustus 2023.

Pelaksanaan pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945. Dijelaskan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Selanjutnya dalam Pasal 22E Ayat 2, dijelaskan bahwa pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Termasuk memilih presiden dan wakil presiden yang harus dilakukan setiap lima tahun sekali.

“Satu hal yang kaitannya dengan ajakan untuk memikirkan dan melakukan kajian antisipatif terhadap kondisi darurat bila kembali terjadi. Kemarin kita dilanda pandemi Covid-19 dan alhamdulillah Covid selesai sebelum pemilu. Tapi, kalau hal kedaruratan sejenis itu terjadi sampai jelang pemilu, bagaimana mengatasinya secara konstitusional, sementara aturan konstitusionalnya belum ada,” terangnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa usulan materi tersebut tak berkaitan dengan penundaan Pemilu 2024. Seluruh pimpinan MPR dalam rapat 8 Agustus 2023, seluruh fraksi sudah berkomitmen terhadap pelaksanaan kontestasi pada 14 Februari mendatang.

“Tidak diundurkan, tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pimpinan MPR juga sepakat amendemen UUD tidak dilaksanakan sebelum Pemilu 2024,” ujar wakil ketua Majelis Syura PKS itu. ●





“Undang-undang juga tidak memper-syaratkan itu (pe-riodisasi anggota DPR). Jadi biar diuji saja”

Jazilul Fawaid

INFO

LEGISLATIF

19

Minggu III • Agustus 2023

ANGGOTA DEWAN DIGUGAT MAHASISWA KE MK

Seorang mahasiswa bernama Andi Redani Suryanata menggugat ketentuan syarat calon anggota DPR, DPRD, dan DPD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta MK membatasi masa jabatan anggota dewan maksimal dua periode seperti presiden.

Andi menggugat Pasal 240 ayat 1 dan Pasal 258 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu. Pasal 240 ayat 1 mengatur sejumlah syarat bagi seseorang untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan, pasal 258 ayat 1 mengatur soal syarat calon anggota DPD.

Andi menilai, bunyi kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, Andi dalam petitumnya meminta MK mengubah bunyi kedua pasal tersebut menjadi: “Syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya memegang jabatan paling lama 2 (dua) periode dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama”.

Dalam berkas gugatannya, Andi menyebutkan, tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota dewan membuka peluang para legislator itu untuk menyalahgunakan kekuasaan, seperti korupsi dan nepotisme. Tidak adanya pembatasan masa jabatan diyakini pula akan menghambat regenerasi kepemimpinan.

Seharusnya, masa jabatan anggota dewan dibatasi maksimal dua periode alias 10 tahun, seperti masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.

“Hal ini supaya periode kerja anggota legislatif sama pentingnya dengan periode kerja presiden/wakil Presiden (eksekutif) agar mencegah keabsolutan dan penyalahgunaan kekuasaan,” kata Andi dalam berkas gugatannya yang tertera di situs resmi MK, dikutip Selasa, 8 Agustus 2023.

Andi juga menyebut, tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota dewan berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kesempatan setara menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Padahal, kesetaraan dan kesempatan yang adil untuk menjadi anggota dewan diatur dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945.

“Sejatinya jika terdapat pembatasan peri-

odisasi dua periode, maka hak-hak konstitusional dan nilai keadilan dapat diberikan, yang pada akhirnya generasi baru dengan tenaga dan pikiran baru dapat mengisi jabatan-jabatan lembaga legislatif ke depannya,” kata Andi.

Gugatan yang dilayangkan Andi ini belum teregister secara resmi di MK. Permohonan dia baru dicatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) per 6 Agustus 2023 dengan nomor 87/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023.

Dalam gugatan ini, Andi menunjuk tiga kuasa hukum dari kantor hukum Leo & Partners. Salah satunya adalah Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, pengacara yang pernah menggugat ihwal pencopotan sepihak mantan hakim konstitusi Aswanto.

Menanggapi gugatan tersebut, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspari Gaus, mengatakan, masa jabatan anggota DPR sebaiknya tidak perlu dibatasi. Menurutnya, jabatan legislatif berbeda dengan jabatan eksekutif yang memiliki tugas fungsi dan wewenang menggunakan dan mengeksekusi anggaran.

“Sedangkan, parlemen tidak berfungsi seperti lembaga eksekutif. Dengan demikian, tentu tidak perlu ada limitasi dan di negara mana pun juga tidak ada pembatasan masa jabatan legislatif tersebut,” kata Guspari, Kamis, 10 Agustus 2023.

Pemerintah dan DPR sudah sepakat Pemilu 2024 masih menggunakan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Artinya, tidak ada pembatasan masa jabatan anggota dewan.

Guspari menekankan, jabatan anggota DPR dan DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang diperoleh melalui mekanisme pemilu yang dipilih langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki hak un-
t u k

menentukan seseorang terpilih lagi atau tidak.

“Jika alasannya pembatasan masa jabatan anggota DPR itu lantaran DPR dianggap tidak memiliki kinerja yang baik, maka masyarakat bisa menghukumnya dengan tidak memilih yang bersangkutan pada pemilihan legislatif berikutnya,” ucapnya.

Meski begitu, dirinya tetap menghormati gugatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di MK yang merupakan hak dari pada warga bangsa melakukan judicial review terhadap UU yang dibuat DPR bersama pemerintah.

la pun menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk menguji dan melakukan kajian terhadap apa yang diajukan oleh masyarakat.

Anggota DPR, Putu Supadma Rudana, menilai, adanya gugatan terhadap UU Pemilu ke MK terkait masa jabatan anggota dewan menjadi maksimal dua periode merupakan opsi yang menarik. Namun, hal tersebut perlu dikaji kembali secara menyeluruh. Sebab, selama ini setiap warga negara berhak menjadi calon legislatif dan belum ada aturan yang mengatur tentang berapa kali maksimal anggota DPR bisa mencalonkan diri.

“Menurut saya sudah baik saat ini, dan jika ke depannya ada perubahan, saya harap semuanya harus menggunakan satu mekanisme yang tepat,” kata Putu Rudana.

Putu mengatakan, jika nantinya wacana tersebut disetujui dan kemudian diatur dalam sebuah undang-undang, perlu diperhatikan kembali kesempatan bagi perempuan dan anak muda di parlemen. Sebab, keterwakilan perempuan dan anak

muda dinilai penting dalam parlemen.

“Tentu wacana ini baik, tetapi kita harus menunggu undang-undang atau konstitusi yang menanganinya,” ujar politikus dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Terakhir, Putu mengatakan jika wacana tersebut diatur dalam undang-undang, semua harus mematuhi. “Memang kesempatan seluas-luasnya untuk setiap warga negara untuk bisa maju, untuk hadir dalam politik juga penting, tetapi kembali lagi, jika aturannya ada maka semua akan mengikuti,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburrokhman, tidak sepakat dengan adanya gugatan itu karena anggota legislatif memiliki fungsi dalam pengawasan terhadap kinerja lembaga eksekutif. Dengan begitu, makin lamanya jabatan anggota legislative, maka diyakini akan makin baik dalam melakukan fungsinya.

“Justru kalau pejabat legislatif lebih lama maka dia akan semakin andal dalam melakukan pengawasan,” kata Habiburrokhman.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas membandingkan dengan Amerika Serikat yang juga memiliki sistem kenegaraan seperti Indonesia. Kata dia, di Amerika Serikat, tidak diberlakukan adanya batasan masa jabatan anggota legislatif, sama halnya dengan di beberapa negara di Eropa.

“Di negara negara Amerika Latin yang diktator memang ada pembatasan masa jabatan anggota legislative, mungkin tujuannya agar sulit melakukan pengawasan terhadap eksekutif,” kata dia.

Habiburrokhman lantas membandingkan antara jabatan dan kekuasaan legislatif dengan eksekutif yang memang harus dibatasi. “Jabatan Eksekutif memang perlu dibatasi dua kali, karena kekuasaannya yang demikian besar dalam mengelola pemerintahan,” kata Habiburrokhman.

Sedangkan untuk anggota legislatif tugas dan kewenangannya adalah untuk mengawasi eksekutif. “Sementara jabatan legislatif di banyak negara tidak dibatasi karena memang fokusnya di bidang pengawasan,” ujar dia.

Atas hal itu, Habiburrokhman memandang kalau penggugat tidak memahami soal perbedaan masa jabatan antara eksekutif dengan legislatif. Dia juga menyebut bahwasanya gugatan serupa pernah terjadi pada 2020. Namun, saat itu gugatan tersebut ditolak oleh MK.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, tak masalah adanya gugatan ke MK dan mempersilakan MK untuk menguji gugatan tersebut.

Wakil Ketua MPR RI itu menyebutkan, dalam undang-undang tak mengatur perihal periodisasi masa jabat anggota legislatif. “Undang-undang juga tidak mempersyaratkan itu (periodisasi anggota DPR). Jadi biar diuji saja,” pungkasnya.

•RDO



“Jangan langsung diproses untuk pengajuan ke presiden, dibahas di TPA (tim penilaian akhir), tanpa melibatkan publik sama sekali”

Robert Na Endi Jaweng



JELANG PEMILU MAKIN BANYAK HOAKS

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan siap menangkal konten-konten hoaks hingga radikalisme di ruang digital menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Langkah tersebut diambil untuk memastikan berlangsungnya pemilu yang produktif dan sehat bagi masyarakat Indonesia.

“Kami akan diskusi dengan banyak pihak untuk mendiskusikan mana yang hoaks, mana yang mengandung narasi-narasi radikalisme,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam siaran persnya, Kamis, 10 Agustus 2023.

Menkominfo berkomitmen untuk menyiapkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar konten-konten bermuatan negatif tidak merusak kedamaian di ruang digital menjelang pesta demokrasi di 2024 itu. Salah satu upaya untuk penanganan konten radikalisme, Budi menyiapkan

koordinasi dan diskusi dengan Kementerian Agama.

“Nanti saya bertemu dengan Kementerian Agama juga mendiskusikan ini, kalau perlu kita juga blokir. Langkah-langkah blokir supaya ruang publik ini lebih sehat dari hoaks, dari konten-konten yang memecah belah bangsa,” ujarnya.

Menurut Budi, esensi pelaksanaan pemilu adalah menyatukan sesama anak bangsa dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas demokrasi.

Dia mengajak masyarakat ambil bagian dan berperan untuk menjaga ruang digital yang aman dan sehat dengan membagikan konten-konten yang positif. Pemerintah juga dijanjikkannya akan menjaga ruang digital dengan cara yang humanis, sehingga menciptakan suasana sejuk jelang Pemilu 2024.

“Sudah semua kita lakukan pendekatan, termasuk langkah-langkah pemerintah untuk memberikan kejelasan di ruang digital atau sosial media kita,” ungkap Budi.

Hal ini sejalan juga dengan strategi komunikasi publik yang disiapkan Kemenkominfo untuk Pemilu 2024 dengan kampanye Pemilu

Damai.

Pemilu Damai menjadi narasi untuk Pemilu 2024 dengan harapan masyarakat Indonesia, khususnya para pemilih pemula yang didominasi generasi Z, tidak terjebak dengan ledakan informasi politik. Termasuk narasi politik di media sosial yang ber-nada memecah belah persatuan bangsa maupun ujaran kebencian.

Sebelumnya, saat dilantik, Budi juga memparkan empat tugas yang



menjadi prioritasnya setelah menjabat, salah satunya adalah mengawal Pemilu Damai 2024.

“Saya pikir tantangan kita banyak sekali soal infrastruktur digital. Yang kedua soal platform-platform yang meresahkan masyarakat juga harus kita dibereskan. Yang ketiga bagaimana ekosistem digital ini yang menjadi tanggung jawab Kominfo.

Dan yang keempat ini pesan dari pak presiden khusus, bersama pak menko bagaimana membangun narasi Pemilu Damai 2024,” ujar Budi.

Saat menerima kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Budi juga menegaskan arti penting keterlibatan lembaga penyiaran dalam menciptakan Pemilu Damai 2024.

“TV (penyiaran) itu perannya menunjukkan, menciptakan Pemilu Damai. Jadi saya berharap di puncak Harsiarnas ada deklarasi komitmen media penyiaran yang bertekad menghadirkan narasi Pemilu Damai 2024,” ungkapnya saat menerima jajaran Komisioner KPI Pusat di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.

Menkominfo juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan menghadiri Peringatan Harsiarnas 2023.

“Presiden juga akan menyampaikan agenda mengenai peran lembaga penyiaran untuk mendukung Pemilu Damai 2024,” ujarnya. ●RDO

Kemendagri Tidak Transparan, Publik Pasti Dirugikan

● Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah

Ombudsman Republik Indonesia meminta Kementerian Dalam Negeri membuka data kepada publik terkait nama-nama calon pejabat kepala daerah yang diajukan oleh DPRD provinsi, kabupaten dan kota demi transparansi proses pengangkatannya.

“Pihak Kemendagri harus membuka data nama-nama yang bersangkutan kepada publik, dan berikan waktu kepada masyarakat untuk mencermati nama-nama yang diajukan. Kemudian ada kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan,” kata Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2023.

Menurutnya, dengan adanya keterbukaan tersebut, sehingga tidak semata

nama-nama yang diajukan DPRD tersebut langsung diproses Kemendagri ke tahap pengajuan kepada presiden tanpa adanya pelibatan publik melalui partisipasi yang bermakna (meaningful participation).

“Jangan langsung diproses untuk pengajuan ke presiden, dibahas di TPA (tim penilaian akhir), tanpa melibatkan publik sama sekali,” ujarnya.

Dia juga berharap nama-nama yang diajukan sebagai pejabat kepala daerah adalah orang yang dapat dipastikan netral secara politik. Sebab, setelah diangkat, mereka akan memimpin di masa-masa yang krusial, yakni pada momentum Pemilu Serentak 2024.

“Bukan karena

kedekatan politik dengan faksi tertentu, atau bukan karena alasan-alasan yang sifatnya itu di luar pertimbangan kompetensi profesional, di luar pertimbangan merit sistem. Seorang kepala daerah atau seorang pejabat kepala daerah itu akan bertugas yang paling utama adalah menjaga kondusivitas dinamika politik di daerah, sekaligus juga menjaga netralitas birokrasi,” tuturnya.

Adapun dari sisi latar belakang, dia mengatakan bahwa pihaknya menemukan masih adanya nama-nama perwira TNI aktif yang diajukan oleh DPRD sebagai calon pejabat kepala daerah.

“Kami sudah menegaskan agar pengangkatan pejabat kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten/kota itu adalah pengangkatan dari kalangan sipil. Kalau pun kemudian ada dari unsur yang berlatar belakang tentara, maka dia harus pensiun dini atau tidak aktif lagi dari dinas keprajuritan,” katanya.

Tak hanya TNI, Ombudsman juga mencatat temuan adanya nama calon pejabat kepala daerah yang berasal dari unsur Polri aktif. “Itu tanpa meminta persetujuan dari Kapolri, padahal diperintahkan, ditegaskan itu bahwa penugasan anggota Polri di luar

struktur kepolisian itu adalah berdasarkan penugasan atau permintaan atau persetujuan dari pihak Kapolri,” terangnya.

Untuk itu, Robert menilai temuan adanya kalangan TNI-Polri aktif tersebut bertolak belakang dengan poin kedua tindakan korektif Ombudsman RI yang sebelumnya sudah pernah disampaikan ke Kemendagri pada 2022, yakni untuk meninjau kembali pengangkatan pejabat kepala daerah dari unsur prajurit TNI aktif.

Diketahui, saat ini Kemendagri masih menunggu usulan nama pejabat untuk menjabat sebagai pejabat kepala daerah di 85 daerah yang masa jabatan kepala-wakil kepala daerahnya berakhir pada September 2023.

Mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, enam usulan nama kemudian dibahas Mendagri untuk dikerucutkan menjadi tiga nama.

Setelah diputuskan tiga nama, kemudian diserahkan kepada presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan presiden. Pengangkatan pejabat gubernur nantinya ditetapkan dengan keputusan presiden. ●RDO





“Dalam batas kewenangannya, pemerintah juga siap mendukung MK dalam tugas beratnya dalam mengawal Pemilu Serentak tahun 2024”

Presiden Joko Widodo

INFO

EKSEKUTIF

21

Minggu III • Agustus 2023

SOAL PEMILU, MK SIAP DIKRITIK PALING PAHIT

Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan siap menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk menghadapi gugatan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nantinya.

“P”ersiapan kami sudah banyak pengalaman. Kami sudah siap dalam segala hal, termasuk sarana prasarana dan peraturan-peraturan untuk mendukung persidangan itu, termasuk PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) yang telah disusun, dibuat. Sudah siap semua,” kata Ketua MK, Anwar Usman, usai Sidang Pleno Khusus dengan agenda Peringatan Ulang Tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.

Anwar mengatakan, MK siap menghadapi kritik yang nantinya dilayangkan kepada lembaga peradilan itu. Menurutnya, kritik merupakan refleksi untuk berbenah, sehingga MK akan terbuka dengan semua kritikan yang membangun.

“Kritikan yang pahit sekali pun kami terima dengan apa adanya, tetapi apa pun kritikan, masukan, catatan, kami tetap istikamah untuk menegakkan konstitusi,” ucap dia.

Terlepas dari itu, Anwar mengatakan bahwa MK tidak bisa memuaskan semua pihak. “Ini sudah pasti. Di semua lembaga peradilan demikian, bukan hanya di Mahkamah Konstitusi, termasuk lembaga peradilan di Mahkamah Agung,” kata dia.

Menurut Anwar, ulang tahun ke-20 ini merupakan refleksi dua dekade eksistensi MK dalam sistem kenegaraan Indonesia. Anwar mengajak semua pihak untuk meningkatkan komitmen, sinergi, dan kerja sama guna mewujudkan peradaban konstitusi yang semakin kuat dan bermakna bagi Indonesia.

Untuk diketahui, MK telah menyelesaikan 3.512 putusan dalam rentang waktu 20 tahun sejak resmi dibentuk pada 13 Agustus 2003 seiring dengan disahkan UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Adapun rincian putusan tersebut adalah 29 Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN); 676 Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU); 1.136 Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA); dan 1.671 Putusan Perkara



Pengujian Undang-Undang (PUU).

Presiden Joko Widodo juga mengatakan, pemerintah siap mendukung Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk mengawal Pemilu Serentak 2024. Selain itu, pemerintah juga siap mengawal pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan menyelesaikan sengketa pemilu seadil-adilnya.

“Dalam batas kewenangannya, pemerintah juga siap mendukung MK dalam tugas beratnya dalam mengawal Pemilu Serentak tahun

2024. Mengawal pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan menyelesaikan sengketa pemilu secepat-cepatnya dan seadil-adilnya,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi pun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh hakim konstitusi dan seluruh pegawai MK karena menjaga integritas dan wibawa Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan sesuai kewenangannya.

Pemerintah, kata dia, siap mendukung MK untuk terus berinovasi dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern. Sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pencari keadilan sesuai mandat konstitusi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi ke-20. “Sekali lagi selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi. Terima kasih telah terus mengawal konstitusi dan mengawal masa depan Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengapresiasi perjalanan kinerja Mahkamah Konstitusi yang kini memasuki usia 20 tahun atau dua dekade setelah resmi dibentuk pada 13 Agustus 2003.

Bamsuet, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa kehadiran MK berkontribusi dalam menata sistem ketatanegaraan, mengokohkan prinsip negara hukum, menguatkan demokrasi, dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga.

“MK dan MPR RI memiliki satu garis perjuangan dan satu na-

pas yang sama dalam menjadi pengawal konstitusi dan penjaga ideologi Pancasila,” kata Bamsuet.

Bamsuet pun menyoroti keberhasilan MK yang telah memutus 3.512 perkara selama dua dekade ini.

“Antara lain terdiri dari 29 putusan sengketa kewenangan lembaga negara, 676 putusan perselisihan hasil pemilu, 1.136 putusan perselisihan hasil pilkada, serta 1.671 putusan pengujian undang-undang,” ucapnya.

Bamsuet menjelaskan MK juga terus bertransformasi secara digital dalam mendukung penegakan konstitusi, yakni dengan menghadirkan judicial administration system yang memperkuat dan mengoptimalkan peran MK dalam menangani, mengadili, dan memutuskan perkara.

Selain itu, sambung Bamsuet, MK juga menghadirkan general administration system untuk memperkuat layanan umum kepada lingkungan internal MK dan umum.

“Kedua sistem tersebut, antara lain terlihat dalam wujud adanya sidang perkara secara daring, permohonan informasi secara online melalui fasilitas PPID Online, menghadirkan sistem informasi manajemen penanganan perkara yang di dalamnya terdapat berbagai file putusan MK, serta salinan putusan yang ditandatangani secara elektronik oleh panitera,” imbuhnya.

Bamsuet juga mengapresiasi kinerja MK yang telah mendapatkan kepercayaan dari The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) untuk menjadi penyelenggara kongres ke-5 WCCJ yang sukses digelar pada Oktober 2022 di Bali.

“Sebanyak 118 negara turut serta hadir dan meramaikan kegiatan internasional mahkamah dunia ini, baik secara daring maupun luring. Event ini tidak hanya penting bagi MK, melainkan juga bagi Indonesia,” ucapnya.

Ia menilai WCCJ tersebut memberikan kesempatan kepada MK untuk membagikan pengalamannya dalam menegakkan konstitusi dalam rangka menjaga perdamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. ●



“Saya nurut perintah partai, dan bekerja untuk kepentingan warga Tomohon dan Sulut pada umumnya”

Wenny Lumentut



PELUANG BESAR MENUJU SENAYAN

Wakil Wali Kota Tomohon, Wenny Lumentut, berpeluang besar terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. Calon anggota legislatif dari PDIP Sulut ini diprediksi bakal membuat kejutan pada Pemilu 2024.

“Salah satu calon anggota legislatif yang akan terpilih ke DPR RI nanti kami yakin Wenny Lumentut,” kata Direktur Eksekutif Domus Politica, Janny Kopalit.

WL, sapaan akrab Wenny Lumentut, dinilai punya basis massa yang jelas untuk memuluskan jalan ke Senayan. Hal ini dibuktikan ketika dia terpilih sebagai anggota DPRD Sulut dua periode.

Tidak hanya itu, suara pendukung WL telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan Ketika memenangkan Pilkada Kota Tomohon. Ketika itu

WL yang berpasangan dengan Carol Senduk berhasil terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengalahkan dominasi Partai Golkar yang menguasai Kota Pelajar ini selama tiga periode.

Di sisi lain, WL diharapkan akan mampu memperjuangkan kesejahteraan rakyat Sulut, terutama para petani cengkih ketika terpilih nanti.

“Bukan tidak mungkin, ketika menjadi anggota DPR RI WL akan bersuara keras untuk

memperjuangkan harga komoditi unggulan di Sulut berupa cengkih, pala dan kopra akan tidak turun signifikan,” kata Budi Tiwa, pedagang cengkih yang mengaku sudah merasakan bantuan WL dalam menaikkan harga cengkih di Sulut.

WL sendiri mengaku apa yang dia lakukan semata-mata untuk rakyat Sulut. “Untuk kesejahteraan rakyat Sulut saya siap berkorban. Makanya kalau dipercaya

memperjuangkan aspirasi rakyat di DPR RI, saya tidak akan menyalahkannya,” ujar Wakil Ketua DPD PDIP Sulut ini.

Wenny juga menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya karena maju sebagai bakal caleg DPR RI dari PDIP. Wenny ber alasan keputusannya ini berdasarkan perintah dari partai.

“Penugasan dari partai untuk ke DPR RI,” kata Wenny, 28 Juli 2023.

Wenny menjelaskan pengunduran dirinya sudah sesuai prosedur. Hal ini sesuai dalam aturan KPU yang mengharuskan kepala daerah atau PNS mengundurkan diri jika maju dalam Pileg.

“Sesuai prosedur, mekanisme KPU pejabat negara harus mundur,” ungkapnya.

Pemohonan pengunduran diri Wenny sebagai Wakil Wali Kota Tomohon telah disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Kota Tomohon, pada 27 Juli 2023. Wenny selanjutnya akan diberhentikan setelah penetapan daftar calon tetap (DCT).

“Definitif nanti Oktober, surat Mendagri bersamaan DCT caleg,” kata Wenny.

Wenny berharap dirinya bisa terpilih. Dia berkomitmen untuk tetap mengabdikan untuk kepentingan warga Sulut. “Saya nurut perintah partai, dan bekerja untuk kepentingan warga Tomohon dan Sulut pada umumnya,” tegasnya. ●



Belajar dari Pemilu Sebelumnya

Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Manado bertemu dengan Wali Kota, Andrei Angouw, membahas tentang Pemilu 2024 serta tahapan yang akan dilalui.

“KPU Manado bertemu dengan wali kota bersilaturahmi sekaligus membahas tentang semua tahapan KPU dan kesiapan kami sebagai penyelenggara pesta demokrasi,” kata ketua KPU Manado, Farley Kaparang, di Manado, Senin, 31 Juli 2023.

Dia mengatakan, KPU menyampaikan kepada pemerintah tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi serta harapan agar didukung menyukseskan penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024.

Sementara Wali Kota Manado, Andrei Angouw, menyambut hangat kunjungan penyelenggara pemilu ke kantornya, karena bisa bertukar pikiran tentang kesiapan pelaksanaan pemilu 2024.

Dia mengatakan dalam pertemuan itu baik wali kota selaku pemerintah maupun KPU sebagai penyelenggara pemilu, saling menyampaikan apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi dalam tahapan penyelenggaraan.

Angouw mengatakan, baik pemerintah maupun KPU bisa belajar dari tantangan pada pelaksanaan sebelumnya, sehingga bisa melakukan langkah antisipasi kedepannya.

“Kita bisa belajar dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya, terutama soal kendala dan tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan,” kata Angouw.

Angouw juga berharap, KPU selaku pe-

nyelenggara pesta demokrasi dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, terutama saat pelaksanaan di hari H.

“Sangat penting pelaksanaan Pemilu di Manado berlangsung aman dan damai agar situasi di kota berlangsung kondusif, supaya investasi aman dan perekonomian otomatis akan terus membaik,” kata Angouw.

Fenomena Joki Caleg

Dosen Kepemiluan FISIP Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, mengatakan, 14 Juni 2023 merupakan akhir bagi parpol mendaftarkan caleg ke KPU sesuai tingkatan. Nama-nama caleg yang didaftarkan diverifikasi oleh KPU soal kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan hingga 23 Juni 2023.

Ferry mengatakan, hasil verifikasi itu disampaikan kepada KPU pada 24-25 Juni 2023. Selanjutnya, sampai 9 Juli 2023 diberikan kesempatan kepada masing-masing parpol untuk memperbaiki jika ada caleg yang belum memenuhi syarat.

Namun demikian, nama-nama yang tidak didaftarkan oleh parpol ke KPU sebagai caleg pada 14 Mei 2023 memungkinkan untuk menjadi caleg. Sebab, KPU lewat kebijakannya tidak melarang parpol untuk mengganti caleg sebelum daftar caleg ditetapkan pada Oktober nanti.

“Jika parpol memasukan nama-nama baru di luar dari caleg yang sudah di daftarkan Mei lalu, maka yang dikhawatirkan adalah ada potensi perjokian,” terang Liando.

Modus joki caleg bisa saja terjadi pada saat pendaftaran Mei 2023. Hal itu terjadi karena caleg yang hendak diikuti sertakan pada pemilu 2024 belum memenuhi syarat saat pendaftaran.

“Modus ini seperti untuk mengakomodasi ratusan kepala daerah yang akan berakhir masa jabatan pada September 2023 nanti,” tandasnya.

Dia menjelaskan,

UU pemilu melarang kepala daerah menjadi caleg kecuali mereka mundur.

Banyak kepala daerah enggan mundur saat mendaftar, sehingga menunggu jabatan berakhir hingga september nanti. Untuk memenuhi syarat pendaftaran, seperti banyak parpol yang menggunakan joki.

“Pihak yang berperan sebagai joki hanya sebagai syarat pelengkap saat pendaftaran parpol. Jika caleg asli sudah memenuhi syarat, maka caleg joki itu akan mundur,” ujarnya.

Joki caleg juga seperti menjadi modus para pejabat birokrat yang akan pensiun sebelum penetapan DCT Oktober nanti.

“Modus ini tidak melanggar UU Pemilu, namun tidak elok dari aspek etis,” ujarnya. ●





“Jadi para simpatisan Anies versus Prabowo di Sumsel yang sekarang kuat bertarung”

Ade Indra Chaniago

KADER DAERAH CUMA MENUNGGU PERINTAH

Belum adanya keputusan soal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden membuat kader partai tidak berani berandai-andai soal siapa yang layak mendampingi jagoan mereka di Pilpres 2024.

Para kader di daerah lebih memilih menunggu perintah daripada berandai-andai. Namun, ada juga yang masih terus mengupayakan pimpinan partai untuk masuk dalam bursa di Pilpres 2024 meski nilai elektabilitasnya kurang mumpuni.

Keputusan PDIP mengukung Ganjar Pranowo sebagai capres membuat elektabilitas Gubernur Jawa tengah itu melambung. Selama ini, kader PDIP masih melakukan sosialisasi terbatas hanya memakai media sosial.

Sejumlah sosok digadag-gadag untuk menjadi wakilnya, mulai dari Sandiaga Uno, Erick Thohir, bahkan Ridwan Kamil yang trendnya terus meningkat meski pimpinan Partai Golkar cenderung memilih sang Ketua Umum, Airlangga Hartarto.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah lantang mengukung Ganjar Pranowo. Sehingga kader, simpatisan dan sayap partai dipastikan akan secepatnya melakukan gerakan untuk Ganjar yang diharapkan semakin memperbesar ruang geraknya untuk melakukan sosialisasi.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI), Arianto, mengatakan, PDIP tidak akan melakukan tawar menawar lagi untuk sosok capresnya, tentunya pada koalisi besar.

Hal yang utama yang harus menjadi perhatian bagi bakal capres dan parpol pengusungnya adalah tiket untuk meloloskan bakal capresnya dahulu. Bakal capres yang harus diajak wajib memiliki modal tiket minimal bisa meloloskannya atau mengenali angka parliamentary threshold.

Artinya, ini yang wajib menjadi acuan utama bagi parpol pengusungnya apabila ingin aman bisa meloloskan jagoan capresnya. Kemudian, logistik dan kenyamanan bakal cawapres. Kalau masih berkuat mengharap insentif elektroal dari bakal capres, maka hal itu sangat keliru.

“Terlebih lagi dengan gencarnya beberapa parpol yang terus bergerilya dengan parpol lainnya supaya bisa membuat koalisi baru. Ini menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan bagi koalisi

capres yang sudah terbentuk tetapi masih sangat rapuh,” jelas mantan peneliti LSI ini.

Sementara untuk calon wakil presiden, Arianto menilai kalau tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sosok alternatif yang baik untuk Ganjar Pranowo. Berbicara soal NU, maka hal itu tidak lepas dari nama Mahfud MD dan Erick Thohir yang mulai cukup dekat dengan organisasi tersebut.

“Namun, jika dilihat dari tren survei, Ganjar Pranowo lebih berpotensi besar akan masuk putaran kedua, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi satu putaran,” tegas Arianto.

Sementara, pengamat politik Sumatera Selatan, Ade Indra Chaniago, menilai, semua bakal capres juga masih belum mau terang-terangan terlihat.

“Cek ombak dulu, mana cawapres yang elektabilitas dan popularitas tinggi. Ada beragam nama cawapres yang akan disandingkan-sandingkan. Setelah mengamati dan mengintipnya selesai, baru keputusan paket lengkap capres-cawapres. Karena sekarang belum pasti, bisa saja kata kita capres, bisa jadi cawapres. Masih melihat peluang di mana menangnya dan politik itu susah ditebak,” jelasnya.

Di Sumatera sendiri, menurut pengamatan Ade Indra Chaniago, nama Ganjar Pranowo masih kurang gaungnya daripada Anies dan Prabowo Subianto.

“Di Sumsel misalnya, saat Pilpres lalu para simpatisan masih kuat untuk Prabowo maju menjadi presiden.

Nah, karena PDIP kemarin sudah bertarung dan menang dengan kondisi sekarang juga lebih berat ke Anies. Jadi para simpatisan Anies versus Prabowo di Sumsel yang sekarang kuat bertarung,” paparnya.

Namun faktor cawapres juga sangat menentukan. Untuk Sumatera, sosok Erick Thohir dari segi popularitas sudah berpeluang dan elektabilitas jauh lebih unggul daripada nama-nama lainnya, seperti Ridwan Kamil.

Erick Thohir memiliki peluang besar karena dari segi popularitas bagus. Dia juga sudah mulai berjalan dengan NU. “Lebih menguntungkan Erick Thohir, jelas siapa yang akan dipilih Ganjar pasti itu,” tegas dia.

Ade mengatakan Ridwan Kamil merupakan orang baru di dunia politik. Sehingga, tidak akan bisa mendongkrak elektabilitas dan tidak akan menguntungkan. Namun, Erick Thohir, meskipun orang baru di dunia politik, dia memiliki popularitas dan elektabilitas.

Dia menyebutkan, keuntungan Ganjar menentukan pilihan kepada Erick Thohir karena ada factor popularitas dan elek-

tabilitas. Popularitas Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI ini di mata masyarakat Indonesia sangat besar. Erick Thohir lebih dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia dari event olahraga, baik tingkat nasional dan internasional.

Elektabilitas dari sisi politik Erick Thohir terafiliasi dengan NU. Sebagai anggota Banser, Erick memiliki potensi besar mendulang suara di Jawa Timur, salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia.

“Artinya, dari semuanya bacapres lebih akan memilih Erick Thohir. Misalnya seperti Ridwan Kamil masih baru sekali di politik dan tidak akan ada peluang untuk terpilih,” ujarnya.

Di kalangan kader partai di daerah, mereka juga masih menunggu instruksi para petinggi soal siapa yang akan mereka dukung nanti.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Wilayah Sumsel 2, Hilmin, mengatakan, untuk saat ini Partai Golkar Sumsel fokus menargetkan kemenangan Pilpres dengan mengukung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Mengenai apakah ada perubahan politik di tingkat pusat, mereka tidak tahu karena fokus menjalankan instruksi partai saja.

Hal yang sama dikatakan Bendahara DPD PDIP Sumsel, Yudha Reinaldi. Menurutnya, soal siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo nanti, hal itu bukan domain mereka melainkan instruksi langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tugas mereka melaksanakan sesuai instruksi Ketua Umum PDIP karena itu sudah wewenang pusat dan mereka hanya menjalankan.

Hal itu juga diamini Sekjen DPC PDIP Kabupaten Muara Enim, Ahmad Imam Mahmudi. “Soal siapa yang menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, kami di daerah ini cuma menjalankan perintah saja mas. Semua itu keputusan ketua umum,” tegasnya. ●



“Meskipun memimpin, angka elektabilitas Ganjar terpaut tidak terlalu jauh dengan Prabowo Subianto”

Ikhwan Rosidi



GANJAR DIHADANG PRABOWO DI JAWA TIMUR

Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing ketat dalam survei elektabilitas memperebutkan dukungan di Jawa Timur yang merupakan daerah kedua dengan jumlah pemilih terbanyak pada Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil survei terbaru dari Surabaya Survey Center (SSC) terkait tokoh yang dianggap mampu melanjutkan visi misi dan program kerja Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo bertengger di posisi pertama sebagai tokoh keberlanjutan dengan perolehan 23,3 persen. Prabowo Subianto menempel ketat dengan perolehan 21,5 persen.

Selain itu, nama-nama lainnya yang muncul di antaranya Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming dengan 10 persen; Menteri BUMN, Erick Thohir 8,2 persen; Menko Polhukam, Mahfud MD 8 persen; dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa 5,8 persen.

Sementara lainnya hanya di bawah 5 persen, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dengan 3,2 persen; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 2,4 persen; bahkan capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan hanya meraih 1,6 persen.

Kemudian, Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, memperoleh 1,2 persen; Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto, hanya 1 persen; serta yang menjawab lainnya 0,8 persen. Sebanyak 11,8 persen menjawab tidak tahu/tidak jawab.

Peneliti Senior SSC, Ikhwan Rosidi, menilai, pertarungan merebut hati masyarakat bagi bakal capres saat ini semakin ketat. Meski Ganjar unggul sebagai tokoh keberlanjutan, Anies Baswedan nampaknya dipandang masyarakat Jatim kuat sebagai tokoh perubahan.

Sebanyak 17,6 persen masyarakat Jatim menganggap Anies sebagai tokoh yang mampu melakukan perubahan, diikuti Agus Harimurti Yudhoyono dengan 14,2 persen, Mahfud MD 12,5 persen, Erick Thohir 11,5 persen, dan Prabowo Subianto 9,2 persen. Sementara, Ganjar Pranowo hanya memperoleh 8,8 persen, disusul Gibran Rakabu-

ming 8,2 persen.

“Seperti halnya pada tokoh keberlanjutan, pada tokoh perubahan inipun nama lainnya masih di bawah 5 persen. Sandiaga Uno 4,1 persen, Ridwan Kamil 3,4 persen, bahkan Khofifah yang Gubernur Jatim hanya 2,6 persen, Muhaimin Iskandar 1,2 persen, Airlangga Hartanto 0,8 persen. Yang menjawab lainnya hanya 0,8 persen, sementara yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab ada 5 persen,” bebernya.

Lembaga survei ini juga melakukan simulasi tiga nama capres yang kini sudah diusung sebagai capres yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dari nama-nama populer yang telah dideklarasikan, diketahui Ganjar Pranowo melesit dan secara elektabilitas berhasil meraih hati masyarakat Jawa Timur. Gubernur Jateng itu memuncaki perolehan dengan 41,5 persen.

“Di Jawa Timur, Ganjar memang masih kuat elektabilitasnya, bila Pemilihan Presiden 2024 hanya diikuti oleh 3 kandidat presiden, bersama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan,” katanya.

Berdasar hasil survei, perolehan elektabilitas Ganjar memimpin dibandingkan dengan dua nama lainnya. Prabowo Subianto memperoleh 37,8 persen, sedangkan Anies Baswedan 17,3 persen.

“Yang menarik adalah meskipun memimpin, an-

gka elektabilitas Ganjar terpaut tidak terlalu jauh dengan Prabowo Subianto yang berada di urutan kedua. Sehingga hasil ini dapat menjadi semacam alarm bagi Ganjar bahwa performa elektoral di Jatim masih perlu untuk dikuatkan ke depannya,” katanya.

Diketahui pula, saat ini nama Ganjar Pranowo terus menunjukkan tren menanjak elektabilitasnya dan menjadi menjadi pemuncak favorit bakal capres pilihan warga Jawa Timur. Ganjar Pranowo memuncaki perolehan tingkat elektabilitas dengan angka 33,5 persen.

“Di wilayah Jawa Timur ini, Ganjar masih bertengger di puncak elektabilitas, tren positif peningkatan angka elektabilitas ini semakin menguatkan dirinya mampu merebut hati masyarakat Jatim, meski masih dibayangi secara ketat oleh beberapa nama, baik itu Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan,” tuturnya.

Elektabilitas Ganjar diikuti Prabowo dengan perolehan 28,4 persen, Anies Baswedan 12,4 persen, dan yang di bawah 5 persen di antaranya AHY dengan 4,5 persen, Ridwan Kamil dan Khofifah 4,2 persen, Mahfud MD 1,8 persen, Erick Thohir 1,6 persen, Muhaimin Iskandar 1,2 persen, dan Airlangga Hartanto serta Sandiaga Uno keduanya 0,8 persen. Sedangkan 6,6 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

Ikhwan
men-
ga-

takan pencapaian signifikan Ganjar ini tidak terlepas dari kerja politik panjang yang dilakukannya selama ini, baik sebagai Gubernur Jateng maupun sebagai tokoh terkemuka di partai politik terbesar di Indonesia.

“Sebagai gubernur, Ganjar dinilai telah berhasil mengelola dan memimpin Jateng ditandai dengan berbagai penghargaan yang diterimanya sebagai kepala daerah. Sedangkan, sebagai tokoh politik, Ganjar juga sukses membangun citra diri positif sejauh ini,” ujarnya.

Lembaga Political Statistics (Polstat) juga merilis hasil survei terbaru terhadap bakal capres 2024. Dari hasil survei yang dilakukan pada 28 Juli hingga 4 Agustus 2023 tersebut, Prabowo Subianto menempati peringkat teratas. Menteri Pertahanan itu unggul jauh dari kompetitornya seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Dari hasil survei itu diketahui elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 41,4 persen. Sedangkan Ganjar Pranowo sebesar 27,0 persen dan Anies Baswedan 26,9 persen. Hasil tersebut berdasarkan simulasi 3 capres yang diprediksi maju di Pilpres 2024.

“Berdasarkan survei Polstat, simulasi Pilpres hanya diikuti tiga capres, Prabowo Subianto tetap memperoleh elektabilitas tertinggi sebesar 41,4 persen,” kata peneliti Senior Polstat, Apan Permana.

Sementara itu, survei Polstat juga melakukan simulasi head to head terhadap tiga capres tersebut. Jika Prabowo Subianto melawan Ganjar Pranowo, mantan Danjen Kopasus tersebut unggul jauh. Prabowo Subianto meraih 53,5 persen, dan Ganjar Pranowo 34,7 persen.

Selanjutnya, jika Prabowo Subianto melawan Anies Baswedan, hasilnya juga tetap sama. Prabowo Subianto mengungguli Anies Baswedan. Berdasarkan hasil survei tersebut, Prabowo memperoleh 56,6 persen dan Anies Baswedan 33,6 persen.

Dia mengatakan, keunggulan Prabowo Subianto terhadap capres lainnya ini hasil realitas dari jawaban pada responden. Sebab, dari berbagai pertanyaan, Prabowo selalu unggul dari kompetitornya.

“Data ini semakin menegaskan bahwa keunggulan Prabowo Subianto atas para kompetitornya adalah suatu realitas, mengingat dalam format pertanyaan apapun Prabowo selalu leading atas lawan-lawannya,” terangnya. ■ RDO

